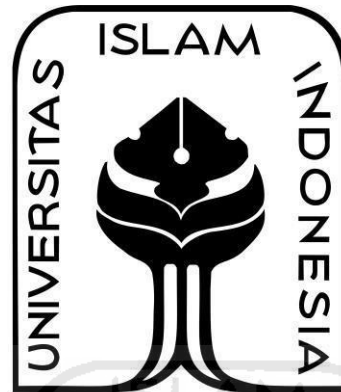


**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE TERHADAP PEMBERITAAN TERKAIT  
SERTIFIKASI HALAL VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA**

**(Analisis Framing Republika.co.id dan CNNIndonesia.com Periode Oktober -  
Desember 2020)**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia**

**Disusun oleh**

**DIMAS ADHI SATRIYA**

**16321093**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**2021**

**SKRIPSI**

**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE TERHADAP PEMBERITAAN TERKAIT  
SERTIFIKASI HALAL VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA**

**(Analisis Framing Republika.co.id dan CNNIndonesia.com Periode Oktober -  
Desember 2020)**

Disusun oleh:

**Dimas Adhi Satriya**

**16321093**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan  
dihadapan tim penguji skripsi pada

Tanggal : 21 Juli 2021

Dosen Pembimbing Skripsi



**Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A**

**NIDN 0512048302**

**SKRIPSI**

**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE TERHADAP PEMBERITAAN TERKAIT  
SERTIFIKASI HALAL VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA**

**(Analisis Framing Republika.co.id dan CNNIndonesia.com Periode Oktober - Desember  
2020)**

Disusun oleh:

**Dimas Adhi Satriya**

**16321093**


Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Tanggal : **21 Juli 2021**

Dewan Penguji :

**1. Ketua : Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A**

**NIDN 0512048302**



(.....)

**Anggota : Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A**

**NIDN 0520058402**



(.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia



**Puji Hariyanti, S.Sos M.I.Kom**

**NIDN. 0529098201**

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Adhi Satriya

Nomor Mahasiswa : 16321093

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Yang menyatakan,



Dimas Adhi Satriya

16321093

## **MOTTO**

Jika kamu memberi kebaikan sebanyak apapun jangan pernah diingat  
Jika kamu mendapat kebaikan walaupun sedikit jangan pernah dilupakan



## **PERSEMBAHAAN**

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Eyang, Nenek, Mama, Ayah dan seluruh keluarga besar
2. Semua sahabat-sahabat saya

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,**

Bismillahirrahmanirahim, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Media Online Terhadap Pemberitaan Terkait Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Di Indonesia (Analisis Framing Republika.co.id dan CNNIndonesia.com Periode Oktober - Desember 2020)” meskipun penelitian ini jauh dari sempurna.

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Telah selesainya skripsi ini, penulis melalui hati terdalam mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan kepada peneliti. Ucapan terimakasih dan hormat saya kepada :

1. Keluarga besar saya yang selalu memberikan do'a serta dukungan yang terbaik. Terima kasih juga kepada nenek saya Sari Bulan Abdul Hamid.
2. Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Ilmu Komunikasi UII.
4. Segenap dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII yang telah membagikan ilmu serta pengalaman kepada saya.
5. Seluruh Staff dan Karyawan FPSB UII Universitas Islam Indonesia, dalam memberikan pelayanan, informasi serta bantuan kepada penulis

6. Seluruh teman-teman seperjuangan Komuniaksi 2016, terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya selama perkuliahan
7. Teman Teman Marching Band UII, yang telah memberikan pengalaman serta pelajaran selama di UII.
8. Sahabat baik saya Doni, Rana, Rio, Dea, Nunu, Mei, Yudis, green apart tim, Aunty Cynthia, Edgar, Vitaloka, Hanita, Grup Badass, dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas semuanya.
9. Orang tua saya selama di Jogja, mas-mbak pavil oren, Mbak Zum, Mbak Fami, Pak Sumar, Mba Nita, Mas Isa yang telah membimbing saya selama di Jogja.
10. Serta pihak-pihak lain yang membantu dan mendoakan penulis selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 20 Juli 2021

Dimas Adhi Satriya

## ABSTRAK

**Dimas Adhi Satriya. 16321093. Pembingkai Media Online Terhadap Pemberitaan Terkait Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 di Indonesia (Analisis Framing Republika.co.id dan CNNIndonesia.com Periode Oktober - Desember 2020). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.**

Isu terkait kehalalan vaksin di tengah pandemi Covid-19 menjadi perbincangan hangat di media massa. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai macam aspek mulai dari kesehatan, agama, hingga kebijakan pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk medeskripsikan bagaimana pembingkai berita dan juga ideologi media dalam konstruksi yang dilakukan oleh media online Republika.co.id dan CNNIndonesia.com terhadap isu ini selama periode Oktober – Desember 2020. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bingkai pemberitaan dan juga bagaimana ideologi media dalam mengkonstruksi berita terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* oleh Robert N. Entman dan menggunakan dua teori yaitu framing dan ideologi media. Sedangkan media online yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah Republika.co.id dan CNNIndonesia.com, dengan berita yang dunggah kedalam portal berita online kedua media tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembingkai yang dilakukan Republika.co.id dan CNNIndonesia.com memiliki perbedaan dalam pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19. Republika.co.id yang berideologi islam mengarahkan pembaca untuk yakin bahwa vaksin akan diberi fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta menampilkan citra MUI yang cukup baik dalam menangani isu tersebut. Sedangkan CNNIndonesia.com yang berideologi nasional cenderung menonjolkan solusi yang diberikan dari berbagai narasumber untuk meyakinkan pembaca bahwa vaksin yang mengandung bahan non halal tetap aman digunakan dilihat dari aspek kesehatan maupun agama .

**Kata kunci:** Sertifikasi halal, Analisis Framing, Ideologi media, Republika.co.id, CNNIndonesia.com



## ABSTRACT

**Dimas Adhi Satriya. 16321093. Online Media Framing of Reporting Regarding Halal Certification of Covid-19 Vaccines in Indonesia (Republika.co.id and CNNIndonesia.com Framing Analysis Period October - December 2020). Communication Studies, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Universitas Islam Indonesia.**

*The issue of halal vaccines in the midst of the Covid-19 pandemic has become a hot topic of discussion in the mass media. This relates to various aspects ranging from health, religion, to government policies. This study was conducted to describe how the framing of news and media ideology in the construction carried out by the online media Republika.co.id and CNNIndonesia.com on this issue during the period October – December 2020. The formulation of the problem in this study is how to frame the news and also how the ideology of the media in constructing news related to the halal certification of the Covid-19 vaccine.*

*The paradigm used in this study is constructivism with a qualitative approach. The method used in this study uses framing analysis by Robert N. Entman and uses two theories, namely framing and media ideology. While the online media that the researchers chose in this study were Republika.co.id and CNNIndonesia.com, with news uploaded to the online news portals of the both media.*

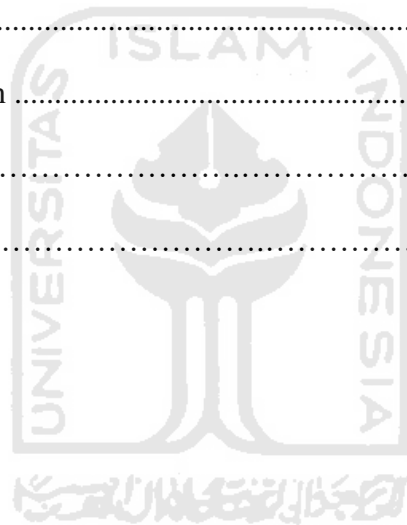
*The results of this study indicate that the framing carried out by Republika.co.id and CNNIndonesia.com has differences in reporting regarding the halal certification of the Covid-19 vaccine. Republika.co.id which has an Islamic ideology directs readers to believe that the vaccine will be given a halal fatwa by the Indonesian Ulema Council (MUI) and displays the image of the MUI which is quite good in dealing with the issue. Meanwhile, CNNIndonesia.com, which has a national ideology, tends to highlight the solutions provided from various sources to convince readers that vaccines containing non-halal ingredients are still safe to use from a health and religious perspective.*

**Keywords:** *Halal certification, Framing analysis, Media ideology, Republika.co.id, CNNIndonesia.com*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ASBTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	17
A. Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 .....	17
B. Repulika.co.id .....	19
C. CNNIndonesia.com .....	24

D. Kategorisasi .....	28
<b>BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Temuan .....	34
1. Analisis Bingkai Republika.co.id .....	34
2. Analisis Bingkai CNNIndonesia.co.id.....	45
B. Pembahasan .....	57
C. Perbandingan Antar Media .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Keterbatasan Penelitian .....	76
C. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Konsep Analisis Framing Robert N. Entman .....
- Tabel 2.1. Berita Republika.co.id terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 Oktober-Desember 2020.
- Tabel 2.2. Berita CNNIndonesia.com terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 Oktober-Desember 2020
- Tabel 2.3. Judul Berita Kategori “Arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin” pada Republika.co.id
- Tabel 2.4. Judul Berita Kategori “Arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin” pada CNNIndonesia.com
- Tabel 2.5. Judul Berita Kategori “Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI” pada Republika.co.id
- Tabel 2.6. Judul Berita Kategori “Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI” pada CNNIndonesia.com
- Tabel 2.7 Judul Berita Kategori “Pendapat Pihak Ketiga” pada Republika.co.id
- Tabel 2.8 Judul Berita Kategori “Pendapat Pihak Ketiga” pada CNNIndonesia.com
- Tabel 3.1 Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan’
- Tabel 3.2 Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin’
- Tabel 3.3 Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin’

Tabel 3.4 Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19’

Tabel 3.5 Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali’

Tabel 3.6 Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal’

Tabel 3.7 Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI’

Tabel 3.8 Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19’

Tabel 3.9 Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19’

Tabel 3.10 Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal’

Tabel 3.11 Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring’

Tabel 3.12 Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat’

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi virus Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak bulan Maret 2020 mempengaruhi berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan hingga pariwisata. Virus yang berawal dari kota Wuhan, China sejak Desember 2019 ini mulai menyebar dengan sangat cepat hingga ke seluruh dunia. Hingga 31 Desember 2020 telah tercatat sebanyak 742.527 total kasus yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data grafik pemerintah ([www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) diakses pada tanggal 13 Januari 2020). Hadirnya vaksin Covid-19 dari pemerintah menjadi salah satu hal yang paling ditunggu guna menekan penyebaran virus. Seperti vaksin maupun obat-obatan lainnya, vaksin Covid-19 harus melalui serangkaian tahapan uji klinis distribusinya sebelum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Tahapan uji klinis ini mulai dilakukan sejak proses produksi vaksin hingga pendistribusian kepada masyarakat.

Menurut laman dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Sosial, vaksinasi Covid-19 memiliki tujuan untuk melindungi serta memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus khususnya Covid-19 sehingga dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat akibat virus tersebut. Selain itu vaksin juga mendorong pembentukan *herd immunity* (kekebalan kelompok) sehingga dapat mengurangi resiko gejala berat hingga kematian pada masyarakat yang terinfeksi (<https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/mengapa-vaksinasi-covid-19-diperlukan> diakses pada tanggal 22 Juli 2021).

Berdasarkan informasi dari *Globalreligiustofutures.org* pada tahun 2020, Indonesia menduduki sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dengan mencapai 229,62 juta jiwa. Rangkaian tahapan uji klinis vaksin Covid-19 Islam salah satunya ialah sertifikasi halal vaksin Covid-19 yang di fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi bagian yang ditunggu oleh umat Islam di Indonesia. Menurut laman dari MUI, Sertifikasi halal ialah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan sesuai syari'at Islam untuk menyatakan kehalalan suatu produk (<https://www.halalmui.org/mui14/> diakses pada tanggal 13 Januari 2021).

Kontroversi terkait kehalalan vaksin yang kemudian menimbulkan polemik pernah terjadi di Indonesia diantaranya vaksin polio OPV yang mengandung bahan tidak halal. Selain itu pada sekitar tahun 2018 telah terjadi kegagalan kampanye nasional terhadap vaksinasi campak-Rubella (MR). Vaksin yang diproduksi oleh perusahaan asal India tersebut ditolak oleh beberapa Majelis Ulama karena mengandung bahan yang tidak halal yaitu babi sehingga menimbulkan polemik. Pada saat itu MUI memberikan fatwa haram terhadap vaksin MR tetapi memperbolehkan penggunaannya dalam kondisi darurat. Namun karena telah menimbulkan dilema dan keraguan di tengah masyarakat, mengakibatkan vaksinasi tidak sesuai dengan target awal yang diberikan pemerintah.

Adapun kronologi terkait proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 selama Oktober hingga Desember 2020 yang kemudian isu tersebut diangkat oleh berbagai media online dimulai sejak Wakil Presiden membahas terkait kehalalan vaksin dan meminta keterlibatan MUI dalam rangkaian vaksinasi Covid-19 pada awal Oktober. Selanjutnya pada bulan November, MUI dan BPOM mengirimkan perwakilan untuk melakukan uji klinis terhadap vaksin dari perusahaan Sinovac Biotech, Sinopharm Group dan CanSino Biological. Adapun pada bulan Desember terdapat isu bahwa vaksin yang telah diuji China diantaranya Sinovac mengandung bahan yang tidak halal yang kemudian MUI memberikan opsi kedaruratan terhadap penggunaan vaksin.

Isu terkait kehalalan vaksin Covid-19 berkaitan dengan bagaimana kinerja pemerintah dalam menangani kondisi darurat seperti saat pandemi Covid-19. Hal tersebut juga berkaitan dengan kepedulian pemerintah dalam menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat khususnya umat Islam terhadap vaksinasi Covid-19. Munculnya berbagai macam isu mulai dari respon ulama, unsur politis hingga keterkaitan dengan medis di tengah perbincangan masyarakat terkait kehalalan vaksin Covid-19 menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Sebagian pihak menganggap bahwa vaksin Covid-19 yang akan digunakan harus mengandung bahan yang halal serta mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, sementara sebagian pihak lain berpendapat bahwa dalam kondisi darurat, vaksin Covid-19 dapat digunakan meski terdapat kandungan yang tidak halal.

Pro dan kontra yang berhubungan dengan kehalalan vaksin Covid-19 cukup banyak menarik perhatian media massa seperti media cetak dan juga media online untuk menuliskan berita dari berbagai macam sudut pandang terkait bagaimana proses sertifikasi halal vaksin

Covid-19. Media memiliki pengaruh yang relatif kuat dalam membangun berbagai persepsi maupun opini di tengah masyarakat. Media dapat mendorong retorika, propaganda hingga konstruksi realitas. Kini hadirnya media baru yaitu media online, memudahkan siapa saja untuk dapat mengakses informasi maupun berita secara digital yang membuat pembaca dapat lebih fleksibel untuk menilai suatu pesan dari media. Media baru pada biasanya mempunyai ciri yang mengaitkan *desentralisasi channel* yang mana pada seluruh kanal media baru ditentukan oleh pusat baik berupa distribusi pesan ataupun penambahan kapasitas dalam penyampaian pesan, dan mengaitkan khalayak secara langsung dalam proses penyampaian pesan yang sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang interaktif (McQuail, 1994, perihal. 20). Media online ialah suatu media massa berbasis telekomunikasi serta multimedia yang tersaji dengan adanya internet. Sebagai bentuk jurnalistik modern, media online berperan dalam memberikan informasi baik secara aktual maupun faktual. Hal tersebut menyebabkan berbagai macam portal media online dengan cepat menyebarkan informasi secara cepat terutama ketika terdapat suatu isu yang sedang hangat di Indonesia termasuk pembahasan mengenai perkembangan sertifikasi halal vaksin Covid-19.

Berita merupakan suatu produk konstruksi sosial dari media massa yang mengangkat salah satu sudut pandang sesuai dengan kepentingan media massa tersebut terhadap suatu peristiwa. Realitas yang dijadikan sebagai keterangan sangat bergantung pada bagaimana fakta yang ada dipahami serta dimaknai (Eriyanto, 2011, hal. 26). Media massa khususnya media online biasanya memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam mengkonstruksi peristiwa seperti proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. Dalam peristiwa ini, setiap media memegang ideologi sendiri dalam memandang suatu fakta yang sama, kemudian dimaknai dengan sudut pandang yang berbeda. Isi pemberitaan pada suatu media dalam peristiwa tersebut dapat mengkonstruksi persepsi masyarakat yang membaca berita pada media tersebut. Media dapat dijalankan oleh suatu kelompok yang dapat mengatur isi berita menjurus kepada apa atau siapa yang menjadi objek pemberitaan.

Selain membahas perkembangan proses sertifikasi dan uji klinis, banyak media massa melihat dan mengkonstruksi berita dalam peristiwa ini melalui kajian agama, kajian kesehatan hingga kebijakan pemerintah yang kemudian disesuaikan dengan masing-masing ideologi media. Peneliti tertarik untuk membahas pbingkaian berita yang dilakukan oleh media massa



karena dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana media membentuk dan juga mengkonstruksi realita pada suatu peristiwa yang pada kesimpulannya terdapat bagian yang ditonjolkan dan ada bagian lain yang disamarkan ataupun dihilangkan yang setelah itu terlupakan oleh khalayak sebab media telah menggiring kepada suatu realitas yang ditonjolkan media pada peristiwa tersebut. dalam penelitian ini menggunakan analisis framing milik Robert Entman yang melihat bagaimana media massa membingkai berita dengan fakta pada suatu peristiwa yang ada. Adapun dalam penelitian ini menekankan pada penggambaran bagaimana proses seleksi serta memunculkan aspek tertentu dari keadaan fakta suatu media.

Dari beberapa media online yang memberitakan isu terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19, peneliti memilih [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) untuk dijadikan objek penelitian. Peneliti memilih kedua media online tersebut karena perbedaan latar belakang termasuk ideologi media pada kedua media tersebut cukup menarik untuk diteliti karena setiap media dalam membingkai berita pada suatu peristiwa yang sama akan memiliki hasil yang berbeda. Sehingga kedua media online tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan peristiwa seperti pada rangkaian proses sertifikasi halal vaksin Covid-19.

Republika merupakan media massa nasional yang lahir dalam komunitas muslim yaitu ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan memiliki karakter berita yang khas. Republika hadir secara online dengan alamat situs [Republika.co.id](http://Republika.co.id) merupakan media yang mempunyai ideologi islam menghadirkan berita yang menurut Hamad (2004) Islam disajikan sebagai agama yang dapat menaruh inspirasi kepada kesadaran sosial yang sejalan dengan aspirasi kontemporer diantara lain keterbukaan, pluralism, serta kecanggihan dunia teknologi informasi (hal. 120). Ideologi pada republika terlihat pada kepemilikan media yakni Erick Thohir sebagai direktur utama saat ini yang tidak memiliki latar belakang sebagai jurnalis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan media yang juga merupakan pengusaha cenderung mendahulukan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum dibandingkan pemilik media yang juga berasal dari bidang jurnalistik sehingga otonomi redaksi terlihat sangat jelas (Keller, 2009, hal. 105). Republika tidak mengalami perubahan baik itu visi maupun misi meskipun media ini berganti kepemilikan dengan menyajikan berita untuk komunitas muslim dengan gaya yang berbeda dengan sebelumnya.

Sedangkan CNN Indonesia adalah situs media milik Trans Media yang bekerja sama dengan Warner Media. CNN Indonesia dengan situs berita CNNIndonesia.com memiliki fokus pada berita umum dengan menyajikan konten lokal dan internasional. Ideologi pada CNNIndonesia.com tidak lepas dari sejarah asal media ini berdiri yaitu Amerika Serikat. Adanya kerja sama CNN di Indonesia membuat media ini tidak akan jauh dari kebijakan media ini berasal karena hal tersebut berkaitan dengan ekonomi politik internasional. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Siswanti (2019) menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com lebih mengikuti ideologi asal Amerika Serikat yang dicerminkan dengan politik, masyarakat serta budaya (hal. 123). CNN Internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menetapkan standar pemberitaan CNN Indonesia

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bagaimana media Republika.co.id yang merupakan media nasional yang memiliki konsep keislaman dilihat dari sejarah media ini sedangkan CNNIndonesia.com yang merupakan bentuk afiliasi dari media luar membingkai isu terkait kehalalan suatu produk yakni vaksin Covid-19 sehingga menjadikan kedua media online tersebut menarik sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menganalisis bagaimana kedua media online yang memiliki latar belakang berbeda dalam membingkai pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 dengan menggunakan teori framing milik Robert Entman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembingkai pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada media online Republika.co.id dan CNNIndonesia.com selama periode Oktober 2020 – Desember 2020?
2. Bagaimana ideologi media dalam mengkonstruksi berita terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada media online Republika.co.id dan CNNIndonesia.com selama periode Oktober 2020 – Desember 2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada media online Republika.co.id dan CNNIndonesia.com selama periode Oktober 2020 – Desember 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana ideologi media dalam mengkonstruksi berita terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada media online Republika.co.id dan CNNIndonesia.com selama periode Oktober 2020 – Desember 2020?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya mengenai analisis *framing* yang dilakukan oleh media dalam mengkonstruksi pesan kepada khalayak serta bagaimana media menggunakan sudut pandang dalam menyeleksi sebuah isu dan menulis berita.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi media dan praktik jurnalistik khususnya media online dalam menjaga objektivitas serta netralitas dalam menyajikan suatu berita.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan antara lain :

1. Penelitian oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Telkom, Bandung pada tahun 2018 bernama Rifa Faadhilah yang berjudul Analisis *Framing* Berita Status Sertifikasi Halal Vaksin Measles Rubella pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com). Penelitian ini membahas mengenai konstruksi berita oleh kedua media online tersebut dalam peristiwa terkait Vaksin MR yang belum tersertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert. N. Entman. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembingkaihan yang dilakukan setiap media dalam mengkonstruksi realitas memiliki cara yang berbeda-beda. [Kompas.com](http://Kompas.com) dalam penelitian ini fokus terhadap sudut pandang pemerintah dan tidak melihat sudut pandang yang lain sedangkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memberikan sudut pandang agama terhadap peristiwa ini. Selain metode penelitian, adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada isu sertifikasi halal suatu vaksin serta media yang dianalisis yaitu [Republika.co.id](http://Republika.co.id).
2. Selanjutnya penelitian yang disusun oleh Alaysi Wan Dahlia Hakiki mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul Analisis *Framing* Pemberitaan Polemik Vaksin MR (Measles Rubella) Antara Pemerintah Dan MUI Dalam Portal Media Online [Kompas.com](http://Kompas.com) Dan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) Periode Agustus 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks media dengan pendekatan kritis serta menggunakan konsep Seleksi Isu dan Penonjolan Isu berdasarkan pemikiran Robert. N. Entman. Penelitian ini menghasilkan bahwa kedua media online tersebut memiliki perbedaan yakni [Kompas.com](http://Kompas.com) membingkai isu ini sebagai masalah prosedural sedangkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) membingkai pemberitaan isu ini dengan hukum keagamaan yang mengedepankan kepentingan umat.
3. Penelitian yang berjudul Analisis *Framing* Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Covid – 19 (Analisis *Framing* Model Robert N. Entman Pada Media Online [Koran.tempo.co](http://Koran.tempo.co) Edisi Maret 2020) yang disusun oleh Arik Sofian mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pembingkaihan berita yang dilakukan oleh media online [Koran.tempo.co](http://Koran.tempo.co) menggambarkan bentuk keraguan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta kebijakan oleh pemerintah terkesan tidak ada keberhasilan karena kurangnya persiapan. Adapun kesamaan penelitian yaitu

pembahasan mengenai bagaimana penanganan pandemi Covid-19 dalam media online dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

4. Berikutnya penelitian pada tahun 2020 yang berjudul Konstruksi Kegagalan Imunisasi Mr Tahap Kedua Dalam Pemberitaan Media Online oleh Heppy N.Y.Haloho, M.A. dari Kalbis Institute. Objek dalam penelitian ini yaitu media online Tempo.co dan Republika Online. Dengan menggunakan konsep analisis *framing* Entman, penelitian ini menghasilkan bahwa Tempo.co membingkai kegagalan cakupan vaksin merupakan ancaman yang serius bagi keselamatan masyarakat karena vaksin MR difatwa haram oleh MUI, sementara Republika online membingkai masalah tersebut sebagai idikasi rendahnya kesadaran masyarakat akan vaksin MR yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya fatwa haram vaksin MR oleh MUI. Selain memiliki metodologi penelitian yang sama, Penelitian ini juga membahas mengenai status kehalalan suatu vaksin yang diberitakan oleh media online yakni Republika.co.id
5. Selanjutnya penelitian dengan Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNNIndonesia.com Dan Tirto.Id Mengenai Kasus Pandemi Covid-19 yang diteliti Maulidatus Syahrotin Naqqiyah pada tahun 2020 dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Menggunakan analisis *framing* model Pan dan Kosicki, penelitian ini menghasilkan bahwa media online CNNIndonesia.com secara struktur sintaksis lebih menonjolkan peran pemerintah yang membentuk opini positif pada publik sedangkan pada media online Tirto.id pada seluruh strukturnya menekankan pada peran medis yang mengarahkan pembaca untuk tetap tenang serta waspada. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas framing pemberitaan kasus terkait pandemi Covid-19 yang diberitakan oleh CNNIndonesia.com.

## **F. Kerangka Teori**

### *1. Framing*

*Framing* digunakan sebagai salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan konsep pembingkaiian secara garis luas serta mendasar. Sudiby (2001) menjelaskan bahwa *framing* ialah metode yang menyajikan realitas terkait kebenaran suatu peristiwa yang tidak diingkari secara penuh melainkan dibelokkan secara halus dengan

menonjolkan suatu. Adapun aspek tertentu yang ditonjolkan dari peristiwa yang berkaitan dengan penulisan suatu fakta yang kemudian aspek tertentu pada suatu peristiwa berkaitan dengan bagaimana pemilihan aspek tersebut ditulis. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan kata atau kalimat, gambar, maupun citra tertentu yang akan ditampilkan kepada *audiens* (Kriyantoro, 2006).

*Framing* merupakan penggambaran bagaimana proses seleksi serta penyorotan aspek-aspek tertentu dalam berita pada suatu media. *Frame* merupakan istilah awal yang bermakna sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir cara pandang politik, kebijakan, wacana, dan juga menyajikan berbagai kategori standar dalam mengapresiasi suatu realitas. *Frame* pada saat ini dipahami secara luas serta di pelajari dalam bermacam bidang pengetahuan secara lebih dalam. *Framing* ialah suatu metode bagaimana suatu peristiwa maupun isu ditampilkan oleh media. Adanya bermacam kepentingan menyebabkan konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang mempunyai kepentingan dengan informasi berita tersebut. (Sobur, 2006, hal. 67).

Robert Entman dalam Eriyanto (2011) mendefinisikan framing sebagai berikut.

*Framing sebagai sebuah proses seleksi dalam berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Sebagai wujud alokasi yang lebih besar dari sisi lain yang menyajikan informasi-informasi dalam konteks yang khas. (hal. 3)*

Menurut Sobur (2006) terdapat dua aspek *framing*, yaitu :

1) Memiliki fakta atau realitas

Bagaimana proses media dalam memilih bagian realitas ataupun fakta pada suatu peristiwa yang akan diberitakan serta yang akan dihilangkan berdasarkan asumsi dari wartawan yang menentukan bagian mana dari realitas tersebut akan disajikan dan bagian mana yang akan dibuang. Setelah itu wartawan akan menentukan fakta atau sudut tertentu pada suatu peristiwa untuk menentukan suatu aspek yang menonjol sehingga berita yang dihasilkan memiliki perbedaan aspek dengan yang ditekankan media lain.

2) Menuliskan fakta

Menyajikan fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Aspek menonjol akan mendapatkan perhatian dan alokasi yang lebih besar yang mempengaruhi khalayak dan diperhatikan dalam memahami suatu realitas. Penonjolan realitas mempunyai tahapan penulisan fakta. Cara penyajian yang meliputi kalimat, perposisi, kata, foto dan gambar pendukung yang akan ditampilkan (hal. 67).

Adapun perbedaan framing sebagai teori dengan framing sebagai metode dalam penelitian ini terletak pada konsep yang tersaji dimana framing yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar acuan terkait pembingkaiannya suatu peristiwa, sedangkan framing sebagai metode pada penelitian ini yaitu analisis framing. Eriyanto (2011) menjelaskan bahwa Analisis *framing* dapat dilihat sebagai suatu analisis yang membahas bagaimana media memaknai dan juga memahami suatu realitas yang ada serta dengan menggunakan cara apa realitas tersebut di tindakan yang kemudian hal tersebut menjadi inti dari analisis framing. Pembentukan atau proses konstruksi realita yang dilakukan media tersebut menghasilkan kesimpulan dimana terdapat bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan serta terdapat bagian lain yang disamarkan maupun dihilangkan. Aspek lain yang tidak ditonjolkan oleh media tersebut pada akhirnya akan terlupakan oleh audiens karena media telah menggiring audiens pada suatu realitas yang menonjol. Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui cara-cara media dengan ideologi masing-masing mengkonstruksikan fakta terhadap suatu peristiwa.

## 2. Ideologi media

Isi pesan pada media massa umumnya memperlihatkan suatu sudut pandang berdasarkan banyak sekali hal termasuk contohnya cara memandang suatu kelompok maupun budaya tertentu, kejadian, pemimpin dan juga masyarakat. Isi pesan yang dilakukan oleh media massa umumnya mengantarkan kepada khalayak yang berhubungan dengan kebijakan, maupun keputusan tertentu yang akan dipakai, sehingga dapat dilihat menjadi ideologi. Media massa berupa kajian yang berhubungan dengan ideologi biasanya menelaah isi dan juga teks media, perihal tersebut ideologi memandang bagaimana media massa dalam mempublikasikan maupun menyajikan representasi hal-hal yang berkaitan dengan suatu kelompok etnis ataupun budaya.

Ideologi media dalam kajiannya berhubungan dengan citra maupun representasi terhadap realitas masyarakat yang ditonjolkan oleh media dalam beragam bentuk pesan. Kepemilikan media atau disebut juga *media ownership* mempunyai makna yang relatif penting dalam memandang peran, ideologi, konten media dan dampak yang dihasilkan media kepada khalayak. Peristiwa atau kejadian yang disajikan media massa tidak ditunjukkan apa adanya, namun bergantung pada kelompok maupun *owner* yang mendominasi, hal tersebut memnuktikan jika faktor kepemilikan media cukup berpengaruh terhadap suatu peristiwa.

Kajian media (*media studies*) memiliki bagian penting yakni kajian tentang ideologi media yang menelaah isi media dengan tujuan untuk melacak gagasan pokok, nilai maupun motif utama yang tercantum di dalam dan juga dibalik suatu teks. Ideologi media pada dasarnya berbentuk gagasan serta nilai-nilai pokok melalui pesan-pesan yang telah dikonstruksi oleh media massa yang setelah itu disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk seperti paket berita, iklan, film, tayangan sinetron dan juga siaran reality show. Konsep yang diusung media yang diantara lain sistem keyakinan (*belief system*), prinsip gagasan (*basic way of thinking*), pandangan dunia (*worldviews*), dan nilai (*values*) sangat berhubungan dengan konsep ideologi media (Pawito, 2014, hal. 6).

Pawito (2014) menyatakan bahwa ideologi media kerap kali melibatkan perdebatan di antara dua kubu pandangan yang saling berlawanan:

*Pandangan bahwa teks media cenderung mempromosikan pandangan ideologis dari kalangan-kalangan dominan, dan pandangan bahwa teks media mengamplifikasi pandangan ideologis tandingan dalam upaya penegasian, perlawanan, dan pembebasan. Menariknya dalam hubungan ini bahwa kedua pandangan tersebut sama-sama menyebut (mengakui adanya) kekuatan atau kekuasaan kalangan dominan. Nampak dari sisi ini bahwa, setidaknya sampai tingkat tertentu, media massa menjadi kancah pergumulan budaya (battle field of culture) terutama dalam konteks demokrasi. Berbagai nilai dan/ gagasan diamplifikasi oleh media massa dikonteskan, dikompetisikan oleh dan/atau melalui media massa. (hal. 7)*

Terkait peran media dalam mengukuhkan ideologi tertentu, Gramsci menerangkan bahwa dalam membentuk suatu teori yang menekankan bagaimana penerima kelompok yang didominasi kepada hadirnya kelompok dominan yang berlangsung pada proses yang damai serta tanpa aksi kekerasan. Media dapat menjadi suatu sarana yang dimana pada kelompok yang mengukuhkan posisinya dapat dengan mudah menganggap kelompok lain rendah. Hal tersebut bukan berarti menunjukkan media merupakan kekuatan jahat yang berencana untuk menganggap



rendah masyarakat bawah. Proses terkait wacana perihal bagaimana citra masyarakat bawah dianggap buruk pada media berlangsung pada proses yang cukup kompleks (seperti dikutip dalam Eriyanto, 2001, hal. 103).

Refleksi yang ditampilkan dalam berita memiliki pemaknaan serta pemahaman yang berbeda-beda pada setiap media. Pemaknaan dan pemahaman akan suatu fakta atau realitas dipengaruhi oleh ideologi media. Ideologi media memiliki peranan penting dalam kajian media dengan mengkaji isi suatu media untuk melihat bagaimana gagasan, nilai-nilai atau motif yang terkandung di balik suatu teks. Teks berita dapat dianalisis kecenderungan ideologisnya. Teks bersifat tidak netral namun dapat merepresentasikan ideologi seseorang atau kelompok yang dapat diidentifikasi. Ideologi dalam media massa diduga masuk melalui bahasa karena bahasa menuliskan realitas. Peter Dahlgren pada tahun 1991 (seperti dikutip dalam Eriyanto, 2002, hal. 11) mengungkapkan bahwa realitas sosial, menurut pandangan konstuktivis (fenomenologis) adalah produksi manusia, hasil proses budaya, termasuk penggunaan bahasa. Melalui penggunaan bahasa sebagai sistem simbol yang utama, para wartawan mampu menciptakan, memelihara, mengembangkan, bahkan meruntuhkan suatu realitas.

Media dalam memaknai realitas melakukan dua proses besar yaitu memilih dan menulis fakta. Suatu peristiwa terdiri dari beberapa fakta yang kecenderungan memiliki pemilihan fakta yang berbeda dengan media yang lain. Fakta-fakta yang berbeda dalam suatu peristiwa sering kali bertentangan. Muttaqin (2012) menjelaskan bahwa peran ideologi media dalam konteks pertentangan ini semakin terlihat proses dan reproduksi yang mendominasi. Media dalam menyajikan suatu realita akan dipengaruhi oleh ideologi yang digunakan dalam sudut pandang media tersebut yang menghasilkan bingkai berita. Latar belakang, sejarah, pendirian media, orientasi media dan juga termasuk didalamnya ideologi media menjadikan media massa harus melakukan pembingkai terhadap fakta-fakta suatu peristiwa yang terjadi. Kajian yang dilakukan Rogers menemukan bahwa institusi media massa dalam menyajikan suatu berita selalu mengambil angle-angle tertentu, baik secara sosial, ekonomi, maupun politis (seperti dikutip dalam Norris et al., 1999, hal. 10).

Media ialah suatu wadah yang cukup strategis untuk membentuk sebuah realitas sosial. Dibalik media yang merupakan agen konstruksi, banyak beragam kepentingan yang ada di dalamnya yang antara lain politik, ekonomi, sosial budaya serta agama. Media dijadikan sebuah

alat hegemoni yang mendominasi kelas kekuasaan yang ada pada konteks politik serta kekuasaan. Kajian kritis melihat jika proses produksi suatu berita pada media massa dipengaruhi oleh pertarungan ideologi media itu sendiri dengan berbagai macam kepentingan. Seperti pendapat Schudson, hal tersebut menciptakan hasil berupa teks berita berupa simbol-simbol yang menggambarkan penguasaan ide serta kepentingan dari kelompok yang memiliki kuasa yang berhasil menang (Seperti dikutip dalam Hidayat, 2000: 437) sebagai berikut.

*Hasil dari produksi berita berkaitan langsung dengan struktur ekonomi media atau industri media keseluruhan dinamika yang terjadi pada ruang berita dapat dilihat sebagai serangkaian kecil interaksi antara struktur dan agensi pada beberapa konteks historis spesifik, secara khusus sebagai kontestasi antara pemilik dan jurnalis dikaitkan dengan peluang dan kemampuan mereka menguasai elemen-elemen pada struktur, dimana kontestasi ini dilatarbelangi oleh ideologi masing-masing (sejalan dengan perkembangan kapitalisme tertentu). (hal. 437)*

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Paradigma dapat dijelaskan berupa landasan maupun dasar untuk menghasilkan suatu teori berdasarkan perbedaan cara pandang. Paradigma ialah pemikiran fundamental yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok masalah (Subject Matter) disiplin tertentu. Peran paradigma sangat penting untuk menentukan arah perkembangan serta perubahan suatu ilmu pengetahuan salah satunya ilmu komunikasi (Ritzer, 2010, hal. 697).

Adapun paradigma yang digunakan pada penelitian dengan judul Pembingkai Media Online Terhadap Pemberitaan Terkait Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Di Indonesia (Analisis Framing Republika.co.id dan CNNIndonesia.com Periode Oktober - Desember 2020) ini ialah paradigma konstruktivisme. Sejak tahun 70-an paradigma konstruktivisme mulai tumbuh dalam ilmu komunikasi yang diperkenalkan oleh Jesse Delo serta rekan-rekannya. Pada paradigma ini individu melakukan suatu penilaian tertentu ataupun interpretasi serta berperan dari banyak sekali kategori konseptual yang terletak pada pikirannya (Morissan, 2009, hal. 7). Dalam studi ilmu komunikasi, paradigma konstruktivisme kerap diklaim sebagai paradigma produksi serta pertukaran makna. Penelitian ini memandang jika realitas sosial yang terjadi pada saat ini terjadi secara tidak alamiah tetapi ialah hasil dari sebuah konstruksi seperti yang ada dalam paradigma

konstruktivisme. Paradigma ini juga digunakan untuk memandang suatu kejadian maupun peristiwa yang telah dikonstruksi oleh pihak yang mempunyai kepentingan dengan metode serta tujuan pihak tersebut dalam menciptakan suatu konstruksi.

## 2. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang membagikan penjelasan secara jelas yang terdapat pada suatu pemberitaan. Penelitian kualitatif menguasai bagaimana fenomena apa yang dirasakan oleh sasaran penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan secara keseluruhan dan dengan metode deskripsi pada bentuk kata-kata serta bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta menggunakan bermacam tata cara alamiah (Moleong, 2002, hal. 57). Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang membentuk data yang deskriptif berisi kata-kata yang dijabarkan secara tertulis maupun lisan berdasarkan objek yang sedang diamati.

## 3. Analisis Framing Model Robert. N. Entman

Metode analisis *framing* Robert N. Entman ialah metode yang digunakan pada penelitian ini. Metode ini memandang bagaimana pembingkai media dengan melihat proses seleksi serta menonjolkan aspek tertentu dalam suatu realitas sosial. Hakikat pembingkai berita ialah suatu instrumen metodologis yang digunakan dalam memandang tata cara media dalam membentuk suatu wacana serta realitas sosial yang kemudian menghasilkan berita (Eriyanto, 2002, hal. 191). Entman berpendapat bahwa pada pembingkai terdapat dua dimensi besar di antara lain seleksi isu dan juga penonjolan aspek. Penonjolan ialah proses dalam membentuk informasi sebagai lebih berarti, lebih menarik, serta mudah diingat oleh masyarakat. Penonjolan suatu realitas yang ditampilkan media memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan perhatian serta pengaruh audiens dalam memaknai suatu realitas (seperti dikutip dalam Eriyanto, 2002, hal. 221).

Analisis *framing* pada metode dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau sudut pandang media dalam menyeleksi isu suatu berita. Penelitian ini menggambarkan bagaimana proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang diinstruksi oleh media terutama dalam pembahasan mengenai sertifikasi vaksin Covid-19 di media online. Peneliti memilih perangkat framing model Robert N. Entman dikarenakan perangkat ini dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian terhadap bingkai

pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 yang ditulis oleh media online Republika.co.id dan juga CNNIndonesia.com sehingga dapat memudahkan dalam memperkirakan masalah. Entman memberikan konsep mudah yang dapat membagikan bagaimana pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi penyelesaian pada suatu berita yang dikonstruksi oleh media yang menekankan bagaimana kerangka beripikir tertentu pada suatu peristiwa.

Tabel 1.1

Konsep Analisis *Framing* Robert N. Entman

1.	<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Sebagai masalah apa?
2.	<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
3.	<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
4.	<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah

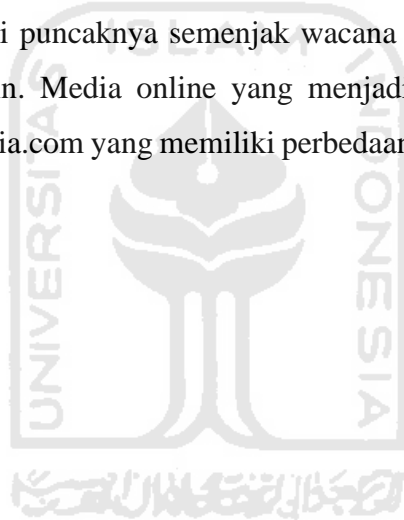
#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing yang dikonsepsikan oleh Robert N. Entman ,

yaitu : *Define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make a moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (penyelesaian).

## 5. Unit Analisis

Pemberitaan mengenai vaksin covid-19 yang disebut menjadi salah satu solusi atas pandemi dalam pemberitaannya mencuat sejak sekitar agustus 2020. Sertifikasi halal vaksin oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu isu yang diangkat berbagai media online dengan berbagai macam sudut pandang sejak oktober 2020. Berita mengenai proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 menghangat setelah MUI mengadakan uji klinis terhadap vaksin dari beberapa perusahaan produsen vaksin Covid-19. Peneliti mengambil rentang waktu oktober hingga desember 2020 karena pemberitaan di media online terkait proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 mengalami puncaknya semenjak wacana pemerintah dalam melibatkan MUI melakukan uji klinis vaksin. Media online yang menjadi objek penelitian ini adalah [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) yang memiliki perbedaan latar belakang termasuk juga ideologi media.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19

Mewabahnya virus Covid-19 yang telah dinyatakan pandemi ialah peristiwa menyebarnya penyakit virus corona yang terjadi pada seluruh dunia yang diakibatkan oleh virus tipe baru dengan nama SARS-COV-2. Pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan, China pada sekitar bulan Desember 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020, The World Health Organization menetapkan penyebaran virus ini menjadi pandemi. Berdasarkan data Wikipedia, ada lebih dari 53 juta kasus terserangnya virus Covid-19 yang telah dilaporkan dari kurang lebih sebanyak 219 negara di seluruh dunia ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19) diakses pada 14 Januari 2021). Hingga 31 Desember 2020 berdasarkan data grafik pemerintah, telah tercatat sebanyak 742.527 total kasus yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Salah satu upaya penekanan penyebaran virus Covid-19 adalah penyediaan vaksin oleh pemerintah. Vaksin nantinya akan melalui tahapan uji klinis baik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga mendapatkan sertifikasi Halal oleh MUI sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Sejak Oktober 2020, Pemerintah Indonesia telah memesan tiga jenis vaksin Covid-19 dari tiga perusahaan Cina yaitu Cansino, G42 atau Sinopharm dan Sinovac. Ketiga perusahaan produsen vaksin tersebut akan mereka kembangkan pada November 2020. Status kehalalan vaksin Covid-19 sangatlah penting mengingat berdasarkan data *Globalreligiousfutures* Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 229,62 juta jiwa pada tahun 2020.

Adapun kronologi terkait proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 selama periode penelitian Oktober hingga Desember 2020 bermula sejak Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dalam beberapa kesempatan membahas mengenai kehalalan vaksin Covid-19 termasuk meminta keterlibatan MUI dalam penanganan pandemi Covid-19 pada awal Oktober. Wacana pemerintah yakni dengan membentuk tim kawal vaksin covid-19 dari pihak MUI yang nantinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk BPOM dan juga Biofarma dalam melakukan uji klinis vaksin. Selanjutnya pada bulan November 2020, MUI dan BPOM mengirimkan perwakilan masing-masing untuk melakukan uji klinis vaksin di China. Adapun perusahaan

pabrik vaksin yang akan diuji adalah perusahaan milik Sinovac Biotech, Sinopharm Group dan CanSino Biological. MUI dalam hal ini mengirimkan satu orang yang memiliki keahlian bidang kehalalan produk serta satu orang yang ahli dalam hal yang berhubungan dengan fatwa. Selama bulan November, MUI khususnya tim LPPOM melakukan rangkaian proses yang cukup panjang dalam menguji kehalalan vaksin sebelum di fatwakan halal oleh tim Komisi Fatwa sehingga vaksin mendapatkan ijin edar. Pada bulan ini MUI juga mengejar target dari pemerintah yang cukup singkat di tengah situasi pandemi yang belum bisa terkendali.

Selanjutnya selama bulan Desember, MUI berhasil menyatakan halal beberapa vaksin diantaranya Pfizer Biotech. Namun selama bulan Desember terdapat isu bahwa vaksin yang telah diuji China diantaranya Sinovac bersinggungan dengan bahan yang tidak halal yaitu menggunakan enzim babi. Hal tersebut menimbulkan perdebatan yang mengakibatkan MUI menunda untuk memberikan fatwa beberapa vaksin. Namun dalam hal ini MUI memberikan opsi darurat apabila vaksin mengandung bahan yang tidak halal dengan menerbitkan ketetapan penggunaan darurat vaksin oleh MUI. hal tersebut juga pernah dilakukan MUI terhadap beberapa vaksin penyakit lainnya yang mengandung babi seperti vaksin Rubella.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam laman website miliknya menjelaskan bahwa sertifikasi halal ialah rangkaian proses berdasarkan syariat Islam yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan keterangan halal pada suatu produk yang dinyatakan dengan fatwa tertulis. Produk yang diuji kehalalannya oleh MUI cukup beragam diantaranya makanan, kosmetik, hingga obat-obatan termasuk juga vaksin yang kemudian akan dilakukan tahapan uji klinis oleh tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Label halal dari MUI nantinya akan dicantumkan pada kemasan produk yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang memiliki wewenang. Tujuan diberikannya sertifikasi halal oleh MUI adalah untuk memastikan statu kehalalan suatu produk yang nantinya diharapkan dapat memberikan kenyamanan batin konsumen yang akan mengonsumsi suatu produk. Adapun diterapkan sistem jaminan halal oleh MUI untuk keberlanjutan produksi halal yang dijamin oleh produsen ([halalmui.org/mui14/](http://halalmui.org/mui14/) diakses pada 14 Januari 2021). Proses tahapan sertifikasi halal vaksin akan diproses dan disahkan oleh komisi fatwa yang melalui tahapan pengecekan yang meliputi inspeksi dokumen, audit pada lokasi produksi dan inspeksi laboratorium. Dilansir melalui laman

artikel Halodoc (2020) adapun kriteria vaksin Covid-19 yang sesuai untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI yaitu :

1. Bahan yang digunakan harus bebas dari bahan haram dan najis.
2. Fasilitas yang digunakan dalam pembuatan vaksin juga harus bebas dari bahan haram dan najis, serta tidak boleh digunakan bersama dengan produk lain yang mengandung babi maupun bahan haram lainnya.
3. Tim yang melaksanakannya harus memiliki komitmen kebijakan halal,
4. Diperlukan prosedur tertulis pelaksanaan produksi halal serta prosedur evaluasinya untuk menjaga kehalalan produk.

## **B. Republika.co.id**

### **1. Profil Republika.co.id**

Koran nasional yang dibentuk oleh kalangan komunitas mulim bagi publik di Indonesia ialah Republika. Zaim Uchrowi yang merupakan mantan wartawan media Tempo memimpin wartawan handal muda yang berupaya menerbitkan media dari kalangan umat Islam. Republika berhasil melewati proses yang cukup ketat dari izin terbit pemerintah dalam pembentukannya yang diketuai B.J. Habibie bernama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Didirikan sejak 1992, Republika terbit pertama kali pada tanggal 4 Januari 1993 dan berpusat di Jakarta. Media online pada Republika dirilis bertepatan pada 17 Agustus 1995 yang diberi nama Republika Online (ROL) dengan menghadirkan informasi pada laman berita di internet dengan alamat [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Situs berita republika pada tahun-tahu pertama hanya menduplikasi berita-berita sesuai dengan versi media cetak dari Republika dan pada tahun 1997, Republika pertama kali mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ).

Pada awalnya, bentuk online dari koran Republika memiliki tujuan untuk memberikan layanan kepada audiens yang tidak dapat menjangkau edisi koran cetak serta audiens yang sedang berada diluar negeri. Perkembangan Republika Online semakin maju seperti tampilan web hingga memperluas materi pada berita. Sekitar tahun 2008, Republika melewati tantangan pada industri media yang kebanyakan pada saat itu melakukan konvergensi media dengan mengganti menjadi web portal media yang menghadirkan bentuk cetak maupun digital pada



setiap distribusi berita. Kini, Republika Online menghadirkan informasi berupa teks, audio serta video dengan berdasar pada teknologi hipermedia dan juga hiperteks. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digital membuat Republika online memberikan inovasi berupa fitur baru perpaduan komunikasi media digital. Portal berita Republika Online menyampaikan informasi secara terbaru yang bersifat kelanjutan yang tersaji dalam beberapa kanal sehingga menghadirkan portal berita yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Perkembangan lain dari Republika Online ialah adanya pilihan dalam tipe English serta terbuka terhadap komunitas (<https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 14 Januari 2021).

Erick Thohir merupakan direktur utama Republika saat ini yang juga merupakan pengusaha, ketua umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) periode 2010 – 2013, presiden dua klub sepak bola Inter Milan (Italia) dan DC United (Amerika Serikat), pemilik saham Persib Bandung, pemilik klub basket Indonesia Warrior pada liga basket ASEAN dan juga pemilik klub basket Satria Muda Britama pada Liga Basket Indonesia ([https://id.wikipedia.org/wiki/Republika\\_\(surat\\_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)) diakses pada 22 Juli 2021).

Sejak didirikan hingga saat ini, Republika tidak mengalami perubahan baik visi maupun visi Republika adalah Modern, Moderat, Muslim, Kebangsaan, dan Kerakyatan. Sedangkan Misi Republika adalah sebagai koran masyarakat baru yang maju, cerdas, dan beradab. Keberadaan media online Republika semakin mengembangkan bisnis ini menjadi lebih kuat dan menjadikan Republika sebagai media massa nasional yang menyajikan informasi kepada masyarakat terutama komunitas muslim.

## 2. Strukur Organisasi Republika.co.id

Berikut adalah struktur organisasi Republika.co.id :

<b>Pemilik</b>	: PT Republika Media Mandiri
<b>Pemimpin Redaksi</b>	: Irfan Junaidi
<b>Wakil Pemimpin Redaksi</b>	: Nur Hasan Murtiaji
<b>Redaktur Pelaksana ROL</b>	: Elba Damhuri
<b>Wakil Redaktur Pelaksana ROL</b>	: Joko Sadewo

**Asisten Redaktur Pelaksana ROL** : Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Rahardjo

**Tim Redaksi** : Agung Sasongko, Bayu Hermawan, Esthi Maharani, Indira Rezkisari, Israr Itah, Yudha Manggala Putra, Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu, Andri Saubani, Reiny Dwinanda, Ratna Puspita, Endro Yuwanto, Nashih Nasrullah, Friska Yolanda, Gita Amanda, Ani Nursalikhah, Hasanul Risqa, Christiyaningsih, Havid Al Vizki, Wisnu Aji Prasetyo, Fakhtar Khairon Lubis, Fian Firatmaja, Surya Dinata Irawan

**Tim Sosmed** : Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, Ammar Said

**Tim IT dan Desain** : Mohamad Afif, Abdul Gadir, Nandra Maulana Irawan, Mardiah, Kurnia Fakhri, Mariz

**Kepala Support dan GA** : Slamet Riyanto

**Tim Support** : Riky Romadon, Firmansyah, Abidin, Nurudin Toto Rahedi, Haryadi

**Sekred** : Erna Indriyanti

3. Kumpulan Berita Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 di [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

**Tabel 2.1.**  
**Berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 Oktober-Desember 2020**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	2 Oktober 2020	Wapres Jelaskan Kehalalan Vaksin Covid-19 ke Para Menteri
2.	2 Oktober 2020	Wapres Jelaskan ke Luhut Kehalalan Vaksin Covid-19
3.	2 Oktober 2020	MUI Akan Dilibatkan dalam Verifikasi Vaksin
4.	2 Oktober 2020	Wapres Minta MUI Ikut Verifikasi Kehalalan Vaksin ke China

5.	2 Oktober 2020	Wapres Minta Kehalaan Vaksin Tak Dipersoalkan
6.	4 Oktober 2020	MUI Ingin Vaksin Covid-19 Halal dan Sesuai Syariat Islam
7.	5 Oktober 2020	Wapres Minta Bentuk Tim Kawal Vaksin Covid Halal
8.	5 Oktober 2020	Biofarma-Wapres Koordinasi Kehalalan Vaksin Covid-19
9.	6 Oktober 2020	Delapan Instansi Kawal Kehalalan Vaksin Covid-19
10.	6 Oktober 2020	Komisi Fatwa MUI Sebut Dua Kemungkinan Terkait Vaksin Covid
11.	6 Oktober 2020	Proses Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Masih Berjalan
12.	6 Oktober 2020	Mengejar Status Halal Vaksin Covid-19
13.	6 Oktober 2020	Status Halal Vaksin Covid, BPJH : Harus Diaudit LPPOM MUI
14.	7 Oktober 2020	Uji Kehalalan Vaksin Covid-19 Awal November
15.	7 Oktober 2020	Peluang Vaksin Covid-19 Bersertifikasi Halal
16.	7 Oktober 2020	Uji Kehalalan Vaksin Covid-19 Awal November
17.	12 Oktober 2020	Bio Farma dan MUI akan Cek Halalan Vaksin Covid-19 Ke China
18.	13 Oktober 2020	MUI : Kehalalan Vaksin Covid Tak Bisa Dideklarasikan Sendiri
19.	13 Oktober 2020	MUI Akan ke China Cek Kehalalan Vaksin Covid-19
20.	14 Oktober 2020	MUI Berangkat Ke China Tinjau Vaksin Covid-19 Besok
21.	14 Oktober 2020	BPJPH Dukung Percepatan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19
22.	17 Oktober 2020	Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan
23.	19 Oktober 2020	9,1 Juta Vaksin Covid-19 Menunggu Persetujuan BPOM dan MUI

24.	19 Oktober 2020	BPOM, MUI dan Kemenag Inspeksi Kehalalan Vaksin Sinovac
25.	21 Oktober 2020	Biofarma : Kehalalan Kami Garansi
26.	22 Oktober 2020	Hukum Vaksin yang Mengandung Gelatin Babi
27.	22 Oktober 2020	LPPOM MUI dan Sinovac Telah Koordinasi Soal Kehalalan Vaksin
28.	23 Oktober 2020	Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali
29.	30 Oktober 2020	MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin
30.	31 Oktober 2020	MUI Janji Transparan Soal Vaksin Covid-19
31.	6 November 2020	Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-Hati Soal Kehalalan Vaksin
32.	6 November 2020	Soal Kehalalan Vaksin, Jubir Wapres : MUI Sangat Berhati-Hati
33.	12 November 2020	Keraguan Soal Kehalalan Vaksin Satgas Pastikan MUI Terlibat
34.	14 November 2020	MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19
35.	14 November 2020	Wiku : Vaksin Harus Halal
36.	15 November 2020	Satgas Covid : Pemerintah Ingin Vaksin yang Halal
37.	20 November 2020	Vaksin Tunggu Fatwa Mui
38.	23 November 2020	Munas MUI Turut Bahas Fatwa Vaksin Covid-19
39.	27 November 2020	BPOM : Vaksin Covid-19 Sinovac Sudah Penuhi Syarat Halal
40.	27 November 2020	Wapres Ingatkan MUI Soal Fatwa Vaksin Covid-19 Sebelum Edar
41.	8 Desember 2020	Penggunaan Vaksin Covid-19 Tunggu BPOM Dan MUI
42.	8 Desember 2020	Vaksin Covid-19 Produksi Pfizer Biotech Difatwa Halal
43.	15 Desember 2020	Vaksin Covid-19 Masih Tunggu EUA dari BPOM dan Halal MUI

44.	16 Desember 2020	MPR : Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal
45.	20 Desember 2020	Pemakaian Gelatin Babi Jadi Isu Perdebatan Kehalalan Vaksin
46.	21 Desember 2020	Kekhawatiran Umat Islam Atas Kehalalan Vaksin Covid-19
47.	22 Desember 2020	Membedah Status Halal Vaksin Covid-19
48.	22 Desember 2020	Pemerintah Harus Yakinkan Rakyat Soal Vaksin Aman dan Halal

### C. CNNIndonesia.com

#### 1. Profil CNNIndonesia.com

CNN Indonesia ialah singkatan dari Cable News Network Indonesia yang bergerak pada bidang stasiun televisi berita digital serta berbayar dan juga situs berita yang dimiliki oleh Trans Media dengan menjalin hubungan kerja sama dengan WarnerMedia, divisi AT&T. laman web berita pada CNNIndonesia.com dirilis pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan alamat situs [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) oleh Yusuf Arifin yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin redaksi. Saluran berita CNNIndonesia menghadirkan berita dengan berbagai konten mulai dari lokal hingga internasional yang berfokus pada berita umum, bisnis, olahraga, teknologi serta hiburan dari studio Trans Media dan tersaji dalam Bahasa Indonesia. Konsep yang diusung oleh CNNIndonesia.com ialah *quick, accurate, impartial* dan juga *thorough* dengan menghadirkan multiplatform konten pada berita yang menyajikan berita tidak hanya berupa tulisan namun juga berupa foto, video serta infografis.

Pendiri sekaligus ketua dari PT Corp Chairul Tanjung dalam laman artikel Warta Ekonomi mengatakan ia sangat bangga serta antusias terhadap kehadiran CNN Indonesia terutama bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh Dunia. Dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan bahwa situs CNN Indonesia akan selalu menjadi media yang tersedia bagi masyarakat yang mengutamakan kualitas berita yang tersajikan dengan akurasi berita, kredibilitas serta bobot berita. Presiden CNN yaitu Jeff Zucker juga mengutarakan rasa

bahagiaanya atas kerja sama yang terjalin karena bagi CNN hubungan tersebut sangatlah penting. Adanya kerja sama dapat membantu menjangkau khalayak yang jauh lebih luas. Adapun visi dan misi dari situs berita CNN Indonesia sebagai berikut:

*Panjang bukan berarti membosankan. Pendek tidak berarti dangkal. Panjang pendek bukanlah rumus. Panjang pendek bukanlah kungkungan. Panjang dan pendek hanyalah sebuah format penyampaian. Sebuah pilihan. Dangkal dan membosankan adalah cermin ketidaktrampilan penyampainya. Bukan karena formatnya. Karenanya berita kami bisa panjang dan bisa pendek. Sama seperti dengan pilihan kami untuk tidak sekadar menggunakan semata kata-kata untuk menyampaikan berita. Grafis, foto, dan video adalah juga alat kami. Semua bisa saling berdiri sendiri bercerita sekaligus saling melengkapi sebagai sebuah kesatuan. Kami tak hendak menjadi hakim. Tak hendak pula menjadi algojo. Niatan kami hanyalah mengungkapkan fakta secara apa adanya. Membilasnya dari bias. Kami ada semata karena kepekaan. Ketika sebuah peristiwa, sebuah perkara, layak untuk disampaikan, menarik, dan sebisa mungkin membuka wawasan. Ketika kegembiraan, tragedi, yang tersembunyi, dan yang terbuka perlu untuk diketahui. Kami hadir untuk mengabarkan. Karenanya berita kami bisa panjang dan bisa pendek. Sama seperti dengan pilihan kami untuk tidak sekadar menggunakan semata kata-kata untuk menyampaikan berita. Grafis, foto, dan video adalah juga alat kami. Semua bisa saling berdiri sendiri bercerita sekaligus saling melengkapi sebagai sebuah kesatuan. Kami tak hendak menjadi hakim. Tak hendak pula menjadi algojo. Niatan kami hanyalah mengungkapkan fakta secara apa adanya. Membilasnya dari bias. Kami ada semata karena kepekaan. Ketika sebuah peristiwa, sebuah perkara, layak untuk disampaikan, menarik, dan sebisa mungkin membuka wawasan. Ketika kegembiraan, tragedi, yang tersembunyi, dan yang terbuka perlu untuk diketahui. Kami hadir untuk mengabarkan (<https://www.cnnindonesia.com/tentang-kami> diakses pada 15 Januari 2021).*

## 2. Struktur Organisasi CNNIndonesia.com

- Owner** : Trans Media dan Warner Media
- Editor in Chief** : Titin Rosmasari
- Deputy Editor in Chief** : Ike Agestu
- Managing Editors** : Gusti M. Anugerah Perkasa, Vetriciawizach Simbolon
- Editors** : Ardita Mustafa, Christina Andhika Setyanti, Christine Novita Nababan, Desy Arfrianti, Gilang Fauzi, Haryanto Tri Wibowo, Muhammad Ikhsan, Suriyanto, S. Yugo Hindarto
- Writers** : Agnes Savithri, Agus Triyono, Ahmad Bachrain, Angga Indrawan, Arif Hulwan, Aryo Putranto, Asri Wuni, Bimo Wiwoho, Dika Dania Kardi, Eka Santhika, Endro Priherdityo, Ervina Anggraini, Febri Ardani, Hanna Azarya Samosir, Ihsan J. Dalimunthe, Jun Mahares, Juprianto Alexander, Nova Arifianto, Oscar Ferry, Prima

Gumilang, Putra Permata Tegar Idaman, Safyra Primadhyta, Surya Sumirat, Wishnugroho Akbar, Fersita Felicia Facette

**News Developers** : Agniya Khoiri, Christie Stefanie, Dhio Faiz, Dinda Audriene Muthmainah, Dini Nur Asih, Elise Dwi Ratnasari, Feri Agus Setyawan, Feybien Ramayanti, Joko Panji Sasongko, Jonathan Patrick, LB. Ciputri Hutabarat, M. Andika Putra, Martahan Sohuturon, Michael Josua, Nurika Naulie Manan, Diah Ayu Saraswati, Priska Sari Pratiwi, Puput Tripeni Juniman, Ramadhan Rizki, Rayhand Purnama Karim, Riva Dessthanisa Suastha, Ryan Hadi Suhendra, Tiara Sutari, Titi Fajriyah, Ulfa Arieza, Yuliyanna Fauzie

**Head of Multimedia** : Fajrian

**Photographers** : Adhi Wicaksono, Andry Novelino, Hesti Rika, Mohammad Safir Makki

**Creative Designers** : Asfahan Yahsyi, Timothy Loen, Basith Subastian

**Video Journalists** : Aulia Bintang Pratama, Tri Wahyuni

**Photo Researcher** : Bisma Septalisma, Mundri Winanto

**HTML Specialist** : Muhammad Ali

**Editorial Secretary** : Amira Rinita, Innesyifa Haqien

**Social Media** : Katri Adiningtyas, Rorien Novriana

**SEO** : Aulia Diza, Donni Iskandar

### 3. Kumpulan Berita Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 di CNNIndonesia.com

**Tabel 2.2.**  
**Berita CNNIndonesia.com terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 Oktober-Desember 2020**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	2 Oktober 2020	Jubir Wapres : jikapun tak halal, vaksin corona bisa dipakai
2.	5 Oktober 2020	Biofarma kutip arahan Wapres soal pemberian vaksin tak halal
3.	6 Oktober 2020	Kemenristek klaim vaksin covid-19 merah putih halal

4.	16 Oktober 2020	Ma'ruf sebut vaksin covid tak halal harus ada ketetapan MUI
5.	17 Oktober 2020	Penjelasan Ma'ruf soal vaksin tak halal harus distempel MUI
6.	18 Oktober 2020	Wapres sebut MUI terlibat dalam penanganan Covid-19
7.	19 Oktober 2020	Vaksinasi covid 9,1 juta orang, Kemenkes tunggu BPOM dan MUI
8.	19 Oktober 2020	MUI belum pastikan kehalalan vaksin covid-19
9.	26 Oktober 2020	Jokowi minta MUI, NU, Muhammadiyah dilibatkan vaksinasi covid
10.	27 Oktober 2020	Ahli : Kandungan babi di vaksin bisa hilang usai disaring
11.	7 November 2020	Jubir sebut Wapres tunggu laporan MUI soal kehalalan Sinovac
12.	19 November 2020	Ma'ruf pastikan label halal sinovac terbit jelang vaksinasi
13.	27 November 2020	Fatwa MUI : Vaksin mengandung sel manusia boleh saat darurat
14.	27 November 2020	Isi lima fatwa MUI hasil munas X, termasuk soal vaksin
15.	27 November 2020	BPOM vaksin Sinovac sudah memenuhi aspek halal
16.	27 November 2020	Epidemiolog ingatkan vaksin Sinovac halal tak jamin aman
17.	30 November 2020	LPPOM MUI belum putuskan kehalalan vaksin Sinovac
18.	7 Desember 2020	Airlangga sebut vaksin corona RI tunggu fatwa halal MUI
19.	7 Desember 2020	MUI sebut vaksin corona Sinovac dalam proses perumusan fatwa
20.	7 Desember 2020	MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal
21.	8 Desember 2020	Pemerintah sebut kajian kehalalan vaksin Sinovac sudah beres
22.	12 Desember 2020	MUI : Sinovac belum melengkapi dokumen kehalalan vaksin covid-19



23.	19 Desember 2020	Ketua MUI soal vaksin corona : secara ‘Zahir’ halal
24.	30 Desember 2020	PBNU bolehkan vaksin corona tak halal asal kondisi darurat

#### D. Kategorisasi

Total keseluruhan berita dari kedua media online tersebut terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada bulan Oktober hingga Desember 2020 yakni [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dengan 48 berita dan [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) sebanyak 24 berita. Dalam memudahkan proses pemilihan berita yang akan dianalisis, peneliti akan memilih dua berita pada setiap media dalam satu kategori yang mengandung topik yang mewakili proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada kedua media online tersebut. Berita-berita tersebut diseleksi berdasarkan alur proses, isu-isu yang diangkat, kedekatan kategorisasi serta kebutuhan peneliti pada kedua media massa tersebut dalam memberitakan sertifikasi halal vaksin Covid-19 selama Oktober-Desember 2020. Penulis membagi menjadi tiga kategori yakni, Arahan Wapres Ma’ruf Amin, Perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI, dan Pendapat pihak ketiga terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19.

##### 1. Kategori Arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Peneliti membuat kategori ini karena dalam pemberitaan kedua media online dalam berita terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 cukup banyak membahas mengenai arahan dan pendapat Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. Komentar Ma’ruf Amin menjadi acuan sumber dalam pemberitaan terkait topik ini. Berikut tabel berita dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dengan kategori “Arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin”.

**Tabel 2.3.**  
**Judul Berita Kategori “Arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin”  
pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id)**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	2 Oktober 2020	Wapres Jelaskan Kehalalan Vaksin Covid-19 ke Para Menteri
2.	2 Oktober 2020	Wapres Jelaskan ke Luhut Kehalalan Vaksin Covid-19

3.	2 Oktober 2020	Wapres Minta MUI Ikut Verifikasi Kehalalan Vaksin ke China
4.	2 Oktober 2020	Wapres Minta Kehalalan Vaksin Tak Dipersoalkan
5.	5 Oktober 2020	Wapres Minta Bentuk Tim Kawal Vaksin Covid Halal
6.	17 Oktober 2020	Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan
7.	6 November 2020	Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-Hati Soal Kehalalan Vaksin
8.	6 November 2020	Soal Kehalalan Vaksin, Jubir Wapres : MUI Sangat Berhati-Hati
9.	27 November 2020	Wapres Ingatkan MUI Soal Fatwa Vaksin Covid-19 Sebelum Edar

Dari sembilan berita diatas, peneliti memilih dua berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) untuk diteliti dengan judul judul “Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan” yang terbit pada tanggal 17 Oktober 2020 dan “Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin” yang terbit pada tanggal 6 November 2020. Berikut tabel judul berita [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) dalam kategori “Arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin”.

**Tabel 2.4.**  
**Judul Berita Kategori “Arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin”  
pada CNNIndonesia.com**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	2 Oktober 2020	Jubir Wapres : jikapun tak halal, vaksin corona bisa dipakai
2.	16 Oktober 2020	Ma’ruf sebut vaksin covid tak halal harus ada ketetapan MUI
3.	17 Oktober 2020	Penjelasan Ma’ruf soal vaksin tak halal harus distempel MUI
4.	18 Oktober 2020	Wapres sebut MUI terlibat dalam penanganan Covid-19
5.	7 November 2020	Jubir sebut Wapres tunggu laporan MUI soal kehalalan Sinovac

6.	19 November 2020	Ma'ruf pastikan label halal sinovac terbit jelang vaksinasi
----	------------------	---

Dari keenam berita CNNIndonesia.com tersebut, peneliti memilih berita yang terbit pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan judul “Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI” untuk dianalisis dan 18 Oktober 2020 dengan judul “Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19” untuk diteliti.

## 2. Kategori Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI

Perkembangan tahapan uji klinis kehalalan vaksin Covid-19 menjadi topik pembahasan utama kedua media online tersebut dalam pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19. Kategori ini banyak membahas mengenai alur, proses hingga keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal vaksin Covid-19. Berikut tabel daftar judul berita dalam Republika.co.id pada kategori “Perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI”.

**Tabel 2.5.**  
**Judul Berita Kategori “Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI”  
pada Republika.co.id**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	2 Oktober 2020	MUI akan Dilibatkan dalam Verifikasi Vaksin
2.	4 Oktober 2020	MUI Ingin Vaksin Covid-19 Halal dan Sesuai Syariat Islam
3.	6 Oktober 2020	Komisi Fatwa MUI Sebut Dua Kemungkinan Terkait Vaksin Covid
4.	13 Oktober 2020	MUI : Kehalalan Vaksin Covid Tak Bisa Dideklarasikan Sendiri
5.	13 Oktober 2020	MUI Akan ke China Cek Kehalalan Vaksin Covid-19
6.	14 Oktober 2020	MUI Berangkat Ke China Tinjau Vaksin Covid-19 Besok
7.	19 Oktober 2020	9,1 Juta Vaksin Covid-19 Menunggu Persetujuan BPOM dan MUI
8.	22 Oktober 2020	LPPOM MUI dan Sinovac Telah Koordinasi Soal Kehalalan Vaksin

9.	30 Oktober 2020	MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin
10.	31 Oktober 2020	MUI Janji Transparan Soal Vaksin Covid-19
11.	14 November 2020	MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19

Dalam mempermudah penelitian, peneliti memilih dua judul berita Republika.co.id yang akan dianalisis dari keseluruhan total berita sesuai dengan kategori ini yakni terbit pada pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan judul “MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin” dan pada tanggal 14 November 2020 dengan judul “MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19”. Berikut tabel daftar judul berita dalam CNNIndonesia.com pada kategori “Perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI”.

**Tabel 2.6**  
**Judul Berita Kategori “Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI”  
pada CNNIndonesia.com**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	19 Oktober 2020	Vaksinasi covid 9,1 juta orang, Kemenkes tunggu BPOM dan MUI
2.	19 Oktober 2020	MUI belum pastikan kehalalan vaksin covid-19
3.	27 November 2020	Fatwa MUI : Vaksin mengandung sel manusia boleh saat darurat
4.	30 November 2020	LPPOM MUI belum putusan kehalalan vaksin Sinovac
5.	7 Desember 2020	MUI sebut vaksin corona Sinovac dalam proses perumusan fatwa
6.	7 Desember 2020	MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal
7.	12 Desember 2020	MUI : Sinovac belum melengkapi dokumen kehalalan vaksin covid-19

Dari ketujuh berita CNNIndonesia.com diatas, peneliti memilih dua berita untuk diteliti yakni berjudul “MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19” yang terbit pada tanggal 19

Oktober 2020 dan dengan judul “MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal” yang terbit pada tanggal 7 Desember 2020.

### 3. Kategori Pendapat Pihak Ketiga

Kategori ini diambil dalam penelitian karena dalam pemberitaan kedua media online tersebut banyak mengangkat pendapat atau komentar pihak ketiga terkait bagaimana proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. Berikut tabel daftar judul berita Republika.co.id dalam kategori “Pendapat Pihak Ketiga”.

**Tabel 2.7**  
**Judul Berita Kategori “Pendapat Pihak Ketiga”**  
**pada Republika.co.id**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	14 Oktober 2020	BPJPH Dukung Percepatan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19
2.	21 Oktober 2020	Biofarma : Kehalalan Kami Garansi
3.	23 Oktober 2020	Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali
4.	14 November 2020	Wiku : Vaksin harus halal
5.	15 November 2020	Satgas Covid : Pemerintah Ingin Vaksin yang Halal
6.	27 November 2020	BPOM : Vaksin Covid-19 Sinovac Sudah Penuhi Syarat Halal
7.	16 Desember 2020	MPR : Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal

Pada kategori ini peneliti memilih dua berita Republika.co.id dari ketujuh berita tersebut dengan judul “Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali” yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2020 dan “MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal” yang terbit pada tanggal 16 Desember 2020. Berikut tabel judul berita CNNIndonesia.com dalam kategori “Pendapat pihak ketiga”.

**Tabel 2.8**

**Judul Berita Kategori “Pendapat Pihak Ketiga”  
pada CNNIndonesia.com**

No	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	5 Oktober 2020	Biofarma kutip arahan Wapres soal pemberian vaksin tak halal
2.	6 Oktober 2020	Kemenristek klaim vaksin covid-19 merah putih halal
3.	26 Oktober 2020	Jokowi minta MUI, NU, Muhammadiyah dilibatkan vaksinasi covid
4.	27 Oktober 2020	Ahli : Kandungan babi di vaksin bisa hilang usai disaring
5.	27 November 2020	Epidemiolog ingatkan vaksin Sinovac halal tak jamin aman
6.	7 Desember 2020	Airlangga sebut vaksin corona RI tunggu fatwa halal MUI
7.	30 Desember 2020	PBNU bolehkan vaksin corona tak halal asal kondisi darurat

Dari ketujuh berita diatas, peneliti memilih dua berita CNNIndonesia.com untuk diteliti yakni berjudul “Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring” yang terbit pada tanggal 27 Oktober 2020 dan berita dengan judul “PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat” yang terbit pada tanggal 30 Desember 2020.

## BAB III

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan temuan serta pembahasan mengenai frame yang dibentuk oleh kedua media online yakni *Republika.co.id* dan *CNNIndonesia.com* dalam memberitakan tentang sertifikasi halal vaksin Covid-19 selama periode bulan Oktober hingga Desember 2020, dimana pada periode tersebut kedua media tersebut banyak membahas bagaimana perkembangan mengenai proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. Kedua media online tersebut memiliki latar belakang serta ideologi yang berbeda yang meyakini peneliti bahwa terdapat perbedaan cara dan juga hasil dalam membingkai sebuah pemberitaan

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing oleh Robert Entman untuk melihat bagaimana sebuah media membingkai sebuah berita dilihat dari: 1) *define problem* (pendefinisian masalah), elemen framing yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan; 2) *diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah), bagaimana sumber masalah dipahami oleh wartawan, penyebab disini bisa berarti apa (*what*) dan siapa (*who*); 3) *make moral judgment* (melakukan keputusan moral), elemen framing untuk membenarkan/memberi penilaian/argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat; dan 4) *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), bagaimana media memberikan solusi untuk masalah tersebut (Eriyanto, 2012, hal. 225-227).

#### A. Temuan

##### 1. Analisis Bingkai *Republika.co.id*

Bab ini berisi mengenai analisis berita sertifikasi halal vaksin Covid-19 dalam media online *Republika.co.id*. Dari total berita sebanyak 49 berita, peneliti menyeleksi berita-berita tersebut dan membagi dalam tiga kategori yakni Arahan Wapres Ma'ruf Amin, Perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI, dan Pendapat pihak ketiga yang selanjutnya pada tiap kategori tersebut peneliti menganalisis berita tersebut menggunakan perangkat *framing* Robert Entman.

##### a. Kategori Arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Berita dengan kategori arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada *Republika.co.id* terdapat sebanyak 9 berita yang diantaranya berisi tentang bagaimana respon Ma'ruf amin terkait proses pengecekan kehalalan vaksin Covid-19 oleh tim LPPOM MUI di China. Dalam

berita juga terdapat beberapa kutipan pernyataan dari Ma'ruf amin yang berisi tentang arahan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pemberian fatwa halal vaksin Covid-19 dan juga himbauan kepada masyarakat mengenai status kehalalan vaksin Covid-19. Peneliti memilih dua berita untuk dianalisis dalam *Republika.co.id* dengan judul “Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan” yang terbit pada tanggal 17 Oktober 2020 dan “Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin” yang terbit pada tanggal 6 November 2020.

1. Berita Sabtu, 17 Oktober 2020. Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan

**Tabel 3.1**

**Analisis Framing berita pada *Republika.co.id* judul ‘Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Wapres menyatakan bahwa dalam kondisi darurat vaksinasi Covid-19 akan tetap dilakukan meski terdapat kandungan non halal
<i>Diagnose Causes</i>	Kandungan enzim non halal pada vaksin meningitis yang sempat difatwa haram oleh MUI.
<i>Make Moral Judgement</i>	Wapres berpesan kepada MUI untuk menerbitkan fatwa atau ketetapan darurat terkait apabila terdapat kandungan non halal dalam vaksin sebagai landasan utama penggunaan vaksin
<i>Treatment Recommendation</i>	Keterlibatan MUI dalam pengawalan proses produksi vaksin Covid-19.

*Define problem* pada berita pertama *Republika.co.id* dalam kategori Arahan Wapres Ma'ruf Amin menuliskan bahwa Wapres menyatakan bahwa vaksinasi akan tetap dilakukan dengan kondisi kedaruratan meski terdapat kandungan nonhalal dalam vaksin Covid-19. peneliti menemukan define problem dalam berita tersebut pada paragraf pertama :

*“...vaksinasi massal tetap bisa dilakukan meski nantinya ditemukan ada kandungan nonhalal di dalam vaksin Covid-19.”*



Republika.co.id menjelaskan *diagnose causes* atau penyebab dari permasalahan tersebut bermula dari MUI yang sempat memberikan fatwa haram atas vaksin Meningitis yang mengandung enzim non halal yang diungkapkan oleh Wapres Ma'ruf Amin, yang kemudian dibandingkan terhadap kehalalan vaksin Covid-19. Peneliti melihat Republika.co.id menuliskannya pada paragraf kedua, yakni :

*“Maruf berkaca pada temuan enzim nonhalal pada vaksin meningitis yang sempat difatwakan haram oleh MUI.”*

Selain itu CNNIndonesia.com juga menambahkan keterangan dengan mengutip hasil wawancara dengan Ma'ruf Amin yang terdapat pada paragraf ketiga :

*“Seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal. Tetapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan, maka bisa digunakan. Walaupun tidak halal, (tapi) secara darurat,”*

Kemudian pada *make moral judgement*, Republika.co.id menuliskan pada berita yakni arahan Wapres Ma'ruf Amin kepada MUI untuk tetap menetapkan ketentuan atau fatwa kedaruratan vaksin Covid-19 apabila ditemukan kandungan non halal dalam vaksin Covid-19 yang nantinya dapat menjadi acuan masyarakat sebelum vaksin diedarkan. Peneliti melihat penulisan dalam berita tersebut pada paragraf keempat, yakni :

*“Namun yang perlu jadi catatan, ujar Maruf, umat Islam di Indonesia tetap butuh landasan ulama terkait penggunaan vaksin Covid-19 nanti. Maksudnya, apabila ditemukan kandungan nonhalal dalam vaksin Covid-19 nantinya, maka MUI tetap perlu menerbitkan fatwa atau ketetapan terkait prinsip kedaruratan vaksin.”*

Selanjutnya peneliti melihat *treatment recommendation* dalam berita yang ditulis oleh Republika.co.id yaitu Ma'ruf meminta MUI terlibat serta mengawal tahapan proses pembuatan vaksin Covid-19 seperti yang tercantum dalam berita pada paragraf keenam :

*“Mengingat pentingnya peran MUI dalam menentukan halal tidak vaksin Covid-19. Ma'ruf meminta pelibatan MUI dalam proses pengadaan vaksin. MUI juga diminta untuk mengawal proses riset hingga produksi nanti.”*

2. Berita Jum'at, 6 November 2020. Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin

**Tabel 3.2**

**Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menunggu laporan hasil terkait kehalalan vaksin Covid-19.
<i>Diagnose Causes</i>	Keterangan Jubir Wapres Masduki yang menilai belum dilaporkan karena hal tersebut sangat efektif sehingga dalam pemeriksaannya perlu hati-hati.
<i>Make Moral Judgement</i>	Proses verifikasi kehalalan vaksin Covid-19 di China terdapat dua orang yakni yang memiliki keahlian di bidang kehalalan produk serta ahli di bidang yang berurusan dengan fatwa.
<i>Treatment Recommendation</i>	Setelah melakukan uji kehalalan vaksin di China, Tim MUI tidak langsung menyimpulkan kehalalan vaksin Covid-19 tetapi akan melakukan sidang fatwa serta melaporkan ke LPPPOM MUI.

Berita kedua pada Republika.co.id pada kategori arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, penulis melihat *define problem* yang dituliskan Republika.co.id berdasarkan keterangan juru bicara wakil presiden Masduki, yang mengatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menunggu hasil laporan terkait kehalalan vaksin Covid-19. Keterangan tersebut terdapat pada paragraf pertama dalam berita, yakni :

*“Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menunggu laporan hasil terkait kehalalan vaksin Covid-19.”*

Selanjutnya pada *diagnose causes* peneliti melihat Republika.co.id menuliskan keterangan dari Masduki bahwa tim MUI berhati-hati dalam pemeriksaan vaksin Covid-19 karena dinilai cukup sensitif. Keterangan yang dituliskan Republika.co.id terdapat dalam berita pada paragraf ketiga:

*“Masduki menilai, belum dilaporkan soal kehalalan vaksin karena hal tersebut sangat sensitif sehingga perlu ekstra hati-hati dalam proses pemeriksaannya.”*

Pada *make moral judgement*, Republika.co.id menuliskan keterangan dari Masduki yang menjelaskan bahwa verifikasi vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh tim MUI yang terdiri dari

dua orang yakni yang memiliki keahlian bidang kehalalan vaksin serta bidang yang berhubungan dengan fatwa. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keempat :

*"Karena ini tidak sederhana, ini verifikasi ke China itu kan ada dua orang, satu yang punya keahlian di bidang kehalalan produk ya dan itu memang orang-orang yang ahli di bidang itu, yang satu adalah yang berkaitan dengan fatwa. Jadi orang yang mengerti urusan keagamaan, fatwa halal seperti apa,"*

Selanjutnya pada *treatment recommendation*, Republika.co.id menuliskan keterangan masduki yang menekankan bahwa tim MUI yang melakukan verifikasi vaksin di China tidak langsung menyimpulkan hasil terkait kehalalan vaksin Covid-19 tetapi akan dilakukan sidang fatwa halal yang akan dilaporkan kepada LPPOM MUI. Keterangan tersebut terdapat pada paragraf kelima:

*"Ia menjelaskan, setelah pulang dari China juga, tim tidak langsung menyimpulkan soal kehalalan vaksin tetapi akan dilakukan sidang fatwa dan dilaporkan ke LPPOM MUI."*

### **b. Kategori Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI**

Kategori perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI dalam berita yang diterbitkan Republika.co.id sebanyak 12 berita berisi tentang bagaimana langkah-langkah dan juga respon MUI dalam perkembangan uji kehalalan vaksin Covid-19 yang nantinya akan ditetapkan dalam fatwa. Berita dari Republika.co.id yang akan diteliti dalam kategori ini terbit pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan judul "MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin" dan pada tanggal 14 November 2020 dengan judul "MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19".

1. Berita Jum'at, 30 Oktober 2020. MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin

**Tabel 3.3**

#### **Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul 'MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin'**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	MUI mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tenang karena dalam kondisi darurat vaksin Covid-19 dapat digunakan meski status belum halal.

<i>Diagnose Causes</i>	Karena dalam hukum syariah suatu produk dapat digunakan dalam kondisi darurat meski statusnya belum halal seperti pada saat pandemi Covid-19.
<i>Make Moral Judgement</i>	Direktur LPPOM MUI mencontohkan vaksin Rubella yang mengandung babi dibolehkan dalam kondisi darurat yang terdapat dalam fatwa MUI, hal ini juga dapat berlaku pada fatwa vaksin Covid-19.
<i>Treatment Recommendation</i>	Lukmanul mengatakan tim audit MUI sudah diberangkatkan ke China untuk melakukan audit terkait pemeriksaan kehalalan vaksin Covid-19.

**Define problem** pada berita pertama Republika.co.id dalam kategori perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI menuliskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tenang terhadap status kehalalan vaksin Covid-19. Peneliti menemukan define problem dalam berita tersebut pada paragraf pertama :

*“Majelis Ulama Indonesia mengingatkan masyarakat tetap tenang dan tidak mengembangkan narasi berlebihan terkait status kehalalan vaksin Covid-19.”*

Republika.co.id menjelaskan **diagnose causes** atau penyebab dari permasalahan berdasarkan keterangan dari Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim suatu produk dalam kondisi darurat dapat digunakan meski statusnya non halal seperti halnya pada saat pandemi Covid-19. Peneliti melihat Republika.co.id menuliskannya pada paragraf ketiga, yakni :

*“Secara hukum syariah, kata dia, suatu produk dalam keadaan darurat tetap boleh digunakan umat Islam meski statusnya belum halal. Hal itu sebagaimana keadaan mendesak saat pandemi Covid-19 yang belum kunjung ada obat atau vaksinnya.”*

Kemudian pada **make moral judgement**, Republika.co.id menuliskan pada berita yakni keterangan Lukman yang mencontohkan adanya fatwa MUI terkait vaksin Rubella yang mengandung babi dapat digunakan karena dalam kondisi darurat hal ini juga dapat berlaku dalam fatwa terkait vaksin Covid-19. Peneliti melihat penulisan dalam berita tersebut pada paragraf kelima, yakni :

*“Lukman mencontohkan ada Fatwa MUI yang memperbolehkan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) meski mengandung babi. Pembolehan itu karena alasan darurat.”*

*Hal serupa tentu dapat berlaku untuk fatwa vaksin Covid-19 jika memang ditetapkan tidak halal.”*

Selanjutnya peneliti melihat *treatment recommendation* dalam berita yang ditulis oleh Republika.co.id bahwa tim MUI terkait vaksin Covid-19 telah diberangkatkan ke China untuk melakukan audit vaksin Covid-19 berdasarkan keterangan Lukman seperti yang tercantum dalam berita pada paragraf keenam :

*“Lukmanul Hakim mengatakan tim audit LPPOM MUI bersama delegasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biofarma dan unsur terkait sudah ke China pada pertengahan Oktober ini untuk melakukan audit vaksin Covid-19.”*

2. Berita Sabtu, 14 November 2020. MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19

**Tabel 3.4**

**Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Tim vaksin Covid-19 masih melakukan proses survei sehingga belum ada hasil yang dapat disampaikan kepada publik.
<i>Diagnose Causes</i>	Tim vaksin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membawa sampel vaksin dari hasil audit lapangan di Cina.
<i>Make Moral Judgement</i>	Untuk meyakinkan kepada masyarakat khususnya umat Islam, vaksin Covid-19 harus memiliki sertifikasi halal sesuai dengan arahan Wapres Ma’ruf Amin.
<i>Treatment Recommendation</i>	Setelah melakukan audit lapangan di Cina, Tim vaksin LPPOM MUI masih harus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait vaksin covid-19 hingga melakukan sidang fatwa halal.

Berita kedua yang dituliskan Republika.co.id dalam kategori Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI, penulis melihat *define problem* yang dituliskan Republika.co.id berdasarkan keterangan Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan yang menyatakan bahwa tim vaksin

masih melakukan proses survei yang hasilnya belum bisa disampaikan ke publik. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf kedua :

*“...tim vaksin Indonesia yang berangkat ke Cina sampai saat ini masih melakukan proses survei sehingga belum ada hasil yang bisa disampaikan ke publik.”*

Pada ***diagnose causes*** peneliti melihat Republika.co.id menuliskan bahwa tim vaksin yang melakukan uji vaksin Covid-19 membutuhkan proses yang cukup lama untuk membawa sampel vaksin Covid-19 dari hasil audit lapangan. Keterangan yang dituliskan Republika.co.id terdapat dalam berita pada paragraf kedua, yakni :

*“...tim membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membawa sampel vaksin dari hasil audit lapangan.”*

Selain itu, Republika.co.id juga menuliskan kutipan hasil wawancara dengan Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan yang menyatakan bahwa tim vaksin sedang melakukan proses pemeriksaan vaksin Covid-19 yang akan dibeli dengan cukup intensif yang terdapat pada paragraf ketiga :

*“Tim vaksin berupaya melakukan proses pemeriksaan yang intensif terkait vaksin yang hendak dibeli,” kata Osmena kepada Republika”*

Pada ***make moral judgement***, Republika.co.id menulis keterangan Wapre Ma’ruf amin yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 harus memiliki sertifikasi halal untuk meyakinkan masyarakat khususnya umat Islam. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keenam :

*“Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam berbagai kesempatan memerintahkan agar vaksin Covid-19 memiliki sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meyakinkan masyarakat, khususnya umat Islam, jika suatu saat program vaksinasi Covid-19 telah berjalan.”*

Selanjutnya pada ***treatment recommendation***, Republika.co.id menyajikan dalam berita hal-hal yang akan dilakukan tim vaksin LPPOM MUI setelah melakukan audit di Cina diantaranya koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak mengenai vaksin Covid-19 hingga dilakukannya sidang fatwa halal. Keterangan tersebut terdapat pada paragraf kelima :

*“Tugas LPPOM MUI pun tidak akan selesai setelah melakukan audit lapangan di Cina. LPPOM MUI masih harus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak mengenai kemanfaatan vaksin hingga melakukan sidang fatwa halal.”*

### **c. Kategori Pendapat Pihak Ketiga**

Selama periode penelitian, Republika.co.id menerbitkan sebanyak 7 berita mengenai proses sertifikasi halal vaksin covid-19 dengan kategori pendapat pihak ketiga. Dalam kategori ini, Republika.co.id menyajikan berita dengan mengambil sudut pandang orang ketiga diantaranya Satgas Covid-19, Biofarma maupun ahli vaksin terkait isu ini. Dalam kategori ini, peneliti memilih dua berita dari Republika.co.id dengan judul “Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali” yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2020 dan “MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal” yang terbit pada tanggal 16 Desember 2020.

1. Berita Rabu, 23 Oktober 2020. Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali

**Tabel 3.5**

**Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Beberapa jenis atau merek vaksin dalam proses pembuatannya memang bersinggungan dengan enzim yang bersumber dari babi namun telah mengalami pencucian serta penyaringan hingga miliaran kali.
<i>Diagnose Causes</i>	Karena dalam pembuatan vaksin dibutuhkan proses serta tahapan yang panjang untuk memastikan vaksin aman dan juga efektif.
<i>Make Moral Judgement</i>	Tahapan uji klinis vaksin melalui tiga tahapan yang melibatkan 1.000 orang relawan untuk memastikan vaksin aman dan juga efektif.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pada situasi tertentu, proses pembuatan vaksin dapat menjadi lebih cepat, tanpa mengabaikan keamanan dan efektivitas. Hal ini juga dapat berlaku dalam vaksin Covid-19 yang dibutuhkan dengan segera.

**Define problem** yang peneliti temukan pada berita pertama yang dituliskan Republika.co.id dalam kategori ini yakni menurut pakar atau ahli vaksin menyatakan bahwa beberapa jenis atau merek vaksin Covid-19 bersinggungan dengan enzim yang bersumber dari babi namun telah melalui pencucian serta penyaringan sebanyak miliaran kali. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf pertama :

*“Beberapa jenis atau merek vaksin dalam proses pembuatannya memang bersinggungan dengan enzim yang bersumber dari babi. Namun, menurut pakar vaksinologi, calon vaksin kemudian mengalami pencucian dan penyaringan hingga miliaran kali.”*

Kemudian **diagnose causes** yang dituliskan oleh Republika.co.id dalam berita, peneliti menemukan bahwa untuk memastikan vaksin aman dan efektif, pembuatan vaksin dibutuhkan proses dan tahapan yang cukup panjang. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keempat :

*“...Dirga mengatakan, untuk membuat vaksin baru dibutuhkan proses dan tahapan yang begitu panjang. Proses itu ditujukan memastikan vaksin tersebut betul-betul aman dan efektif.”*

Selanjutnya **make moral judgement** yang terdapat dalam berita yang dituliskan Republika.co.id, peneliti menemukan bahwa tahapan uji klinis vaksin terdiri dari tiga tahapan yang melibatkan 1.000 orang untuk memastikan vaksin aman dan efektif seperti keterangan yang terdapat dalam berita pada paragraf kelima :

*“Uji coba itu disebut tahapan uji klinis yang terdiri dari tiga tahap dan keseluruhannya melibatkan 1.000 relawan manusia dengan tujuan memastikan vaksin aman dan efektif. Dalam pembuatan vaksin dibutuhkan waktu yang lama karena harus memenuhi tahapan-tahapan tersebut.”*

Pada **treatment recommendation** dalam berita, Republika.co.id menuliskan bahwa dalam situasi tertentu proses pembuatan vaksin diupayakan dapat menjadi lebih cepat tanpa mengabaikan aspek efektifitas dan keamanan seperti saat pandemi Covid-19 yang membutuhkan vaksin dengan segera. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keenam :

*Hanya saja, pada situasi tertentu, proses pembuatan vaksin bisa diupayakan menjadi lebih cepat, tanpa mengabaikan aspek efektivitas dan keamanan. Pengecualian juga berlaku dalam merespons pandemi Covid-19 saat ini yang membutuhkan keberadaan vaksin dengan segera untuk melindungi masyarakat.”*



2. Berita Rabu, 16 Desember 2020. MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal

**Tabel 3.6**

**Analisis Framing berita pada Republika.co.id judul ‘MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Pihak MPR menegaskan bahwa vaksin Covid-19 asal China yang telah tiba di Indonesia belum bisa diedarkan karena harus menunggu izin penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh BPOM dan sertifikasi halal dari MUI.
<i>Diagnose Causes</i>	Perizinan terkait vaksin Covid-19 seperti EUA dan sertifikasi halal dari MUI belum bisa dikeluarkan karena masih dalam proses sehingga vaksin belum boleh diedarkan kepada masyarakat.
<i>Make Moral Judgement</i>	MPR menegaskan bahwa adanya perizinan serta sertifikasi halal tersebut dapat memberikan rasa nyaman dan aman sehingga mengurangi ketakutan masyarakat terhadap pemberian vaksin Covid-19.
<i>Treatment Recommendation</i>	MPR mengajak untuk pihak yang terlibat akan proses perizinan serta sertifikasi halal vaksin Covid-19 agar bersifat transparan dan independen.

*Define problem* pada berita kedua dalam kategori ini yang dituliskan oleh Republika.co.id memaparkan keterangan dari Anggota MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si yang menegaskan bahwa vaksin Covid-19 asal perusahaan asal Cina yang telah tiba di Indonesia belum bisa diedarkan di Indonesia sebelum mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf pertama, yakni :

*“...Vaksin Covid-19 siap pakai dari perusahaan asal China Sinovac yang sudah berada di Indonesia, boleh diedarkan asal sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).”*

Selanjutnya **diagnose causes** yang dimuat oleh Republika.co.id, peneliti melihat Republika.co.id menuliskan bahwa perijinan seperti EUA dan sertifikasi halal MUI belum bisa dikeluarkan karena masih dalam proses sehingga vaksin belum bisa diedarkan kepada masyarakat. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keenam :

*“muncul fakta bahwa semua perizinan baik itu EUA dan sertifikasi halal belum bisa dikeluarkan, sebab semuanya masih dalam proses. Artinya, vaksin ini belum bisa atau belum boleh diedarkan di indonesia.”*

Kemudian **make moral judgement** yang terdapat dalam berita yang dituliskan Republika.co.id, peneliti menemukan bahwa MPR menginginkan untuk segera dituntaskannya perizinan termasuk sertifikasi halal vaksin Covid-19 agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengurangi rasa ketakutan masyarakat yang enggan divaksinasi. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf ketiga, yakni :

*“Izin-izin tersebut sangat penting, sebab akan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meminimalisir keengganan dan ketakutan rakyat untuk divaksinasi.”*

Pada berita, **treatment recommendation** yang dituliskan oleh Republika.co.id yaitu keterangan dari anggota MPR Kurniasih yang menekankan dalam proses pemenuhan syarat perizinan dan sertifikasi halal terkait vaksin Covid-19 agar bersifat transparan dan juga independen. Dalam hal ini Republika.co.id juga mengutip keterangan dari Kurniasih untuk mengajak BPOM serta MUI untuk memahami kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf kedelapan :

*“Kurniasih juga menekankan, dalam proses pemenuhan semua perizinan tersebut agar transparan dan independen. “Saya mengajak BPOM dan MUI untuk memahami keadaan darurat seperti ini, rakyat sangat membutuhkan vaksin agar kehidupan mereka berjalan normal kembali,” tandasnya.”*

## **2. Analisis Bingkai CNNIndonesia.com**

Bab ini berisi tentang analisis bingkai berita dalam CNNIndonesia.com mengenai proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. Terkait topik tersebut, CNNIndonesia.com menerbitkan sebanyak 24 berita yang kemudian peneliti seleksi dan kategorikan menjadi tiga kategori yakni

Arahan Wapres Ma'ruf Amin, Perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI, dan Pendapat pihak ketiga. Selanjutnya, peneliti menganalisis berita yang telah diseleksi pada tiap kategori tersebut dengan menggunakan perangkat framing Robert Entman.

**a. Kategori Arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin**

Pada kategori arahan Wapres Ma'ruf Amin, CNNIndonesia.com menerbitkan sebanyak 6 berita yang menyoroti penjelasan-penjelasan serta kutipan hasil wawancara dengan Ma'ruf Amin terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19. Selain itu, dalam berita juga terdapat respon dan arahan Ma'ruf Amin terhadap peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi vaksin Covid-19 sebelum diedarkan kepada masyarakat. Dalam kategori ini peneliti memilih dua berita pada CNNIndonesia.com yang terbit pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan judul "Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI" untuk dianalisis dan 18 Oktober 2020 dengan judul "Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19".

1. Berita Jum'at, 16 Oktober 2020. Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI

**Tabel 3.7**

**Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul 'Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI'**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa meski terdapat kandungan nonhalal dalam kondisi darurat, vaksin Covid-19 tetap harus mendapatkan keterangan dari MUI.
<i>Diagnose Causes</i>	Ma'ruf Amin membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin Meningitis yang dinyatakan tidak halal oleh MUI namun tetap boleh digunakan untuk mencegah dampak lain yang berbahaya.
<i>Make Moral Judgement</i>	Ma'ruf memberikan keterangan bahwa dalam kondisi darurat seperti pandemi saat ini keselamatan jiwa menjadi hal yang utama.
<i>Treatment</i> <i>Recommendation</i>	-

**Define problem** pada kategori ini dalam berita pertama yang diterbitkan oleh CNNIndonesia.com menuliskan keterangan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, penggunaan vaksin Covid-19 tetap harus mendapatkan ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia meski terdapat kandungan nonhalal dalam vaksin. Keterangan tersebut tercantum dalam berita pada paragraf pertama, yakni :

*“Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penggunaan vaksin virus corona (Covid-19) tetap harus berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekalipun dinyatakan tidak halal”*

Selain itu keterangan tersebut juga terdapat pada paragraf kedua dalam berita :

*“Menurut Ma'ruf, ketetapan MUI itu penting agar vaksin Covid-19 yang tidak halal tetap dapat digunakan dalam keadaan darurat, selama vaksin yang halal belum ditemukan.”*

Kemudian **diagnose causes** yang dituliskan oleh CNNIndonesia.com dalam berita, peneliti menemukan bahwa sesuai dengan keterangan Ma'ruf Amin bahwa sama dengan vaksin Meningitis, dalam kondisi darurat vaksin tetap dapat digunakan meskipun terdapat kandungan nonhalal guna mencegah dampak lain yang lebih berbahaya. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf kelima :

*“Berkaca dari vaksin meningitis itu, Ma'ruf menyebut vaksin yang dinyatakan tidak halal tetap boleh digunakan untuk mencegah dampak lain yang lebih berbahaya.”*

Selanjutnya **make moral judgement** yang terdapat dalam berita yang dituliskan CNNIndonesia.com, peneliti menemukan kutipan pernyataan dari Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa dalam keadaan normal, agama menjadi prioritas namun keselamatan jiwa dalam kondisi darurat seperti pandemi saat ini menjadi hal yang utama. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf ketujuh :

*” Dalam kondisi normal, dia berkata menjaga agama harus dinomorsatukan. Namun, dalam kondisi darurat seperti pandemi, menjaga jiwa menurut dia harus diutamakan. “Karena apa? menjaga jiwa enggak ada alternatif, maka harus diutamakan. Dalam agama, kerjakan salat, ada kemudahan-kemudahan,” ujar dia.”*

Selanjutnya pada **treatment recommendation** dalam berita CNNIndonesia.com, peneliti tidak menemukan adanya tulisan yang menunjukkan penyelesaian yang ditawarkan maupun saran perbaikan mengenai pada berita ini terkait proses sertifikasi halal vaksin Covid-19.

2. Berita Minggu, 18 Oktober 2020. Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19

**Tabel 3.8**

**Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Wakil Presiden Ma’uf Amin memastikan MUI terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk pengadaan vaksin Covid-19.
<i>Diagnose Causes</i>	Ma’ruf berpendapat bahwa karena selama ini fatwa MUI banyak menjadi acuan terutama pada saat pandemi Covid-19.
<i>Make Moral Judgement</i>	Terkait vaksin Covid-19. Ma’ruf telah meminta kepada MUI untuk terlibat dalam seluruh proses serta tahapan pengadaan vaksin Covid-19 termasuk kunjungan pabrik vaksin di China dan juga mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i>	Ma’ruf menekankan vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat harus mengantongi sertifikasi halal dari MUI, tetapi jika dalam kondisi darurat tidak ditemukan solusi lain, vaksin tetap bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh MUI.

*Define problem* pada CNNIndonesia.com dalam berita kedua kategori arahan Wakil Presiden Ma’ruf amin menuliskan pernyataan dari Ma’ruf Amin yang memastikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19. Ma’ruf meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait adanya virus Covid-19. Keterangan tersebut terdapat pada paragraf pertama dalam berita, yakni :

*“Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19. Umat Islam tak perlu khawatir soal kesesuaian syariat Islam dalam berbagai protokol penanganan Covid-19.”*

CNNIndonesia.com menjelaskan *diagnose causes* pada berita tersebut berdasarkan keterangan Ma’ruf yang menyebutkan bahwa fatwa MUI selama ini menjadi acuan umat islam di Indonesia,

dalam hal ini termasuk yang berkaitan dengan pengadaan vaksin Covid-19 di saat pandemi. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf kedua :

*“Ia menyebut, selama ini fatwa MUI banyak menjadi acuan, seperti dalam ibadah salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, dan pembayaran zakat yang dapat dipergunakan penanggulangan pandemi, termasuk tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan baju hazmat.”*

Kemudian pada **make moral judgement**, CNNIndonesia.com menuliskan pada berita berdasarkan keterangan Ma'ruf yang telah meminta untuk melibatkan MUI dalam proses perencanaan, pengadaan pertimbangan hingga sosialisasi vaksin kepada masyarakat terkait kehalalan vaksin Covid-19 termasuk memberangkatkan tim MUI ke China untuk melihat langsung pabrik pembuatan vaksin. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf kelima :

*“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi.”*

Selanjutnya peneliti melihat **treatment recommendation** dalam berita yang ditulis oleh CNNIndonesia.com berdasarkan keterangan Ma'ruf yang menekankan vaksin harus memiliki sertifikasi halal dari MUI namun jika dalam proses vaksin tidak halal, dalam kondisi darurat harus terdapat penetapan yang dikeluarkan MUI. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keenam :

*“Ma'ruf menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah MUI. “Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,” katanya.”*

#### **b. Kategori Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI**

CNNIndonesia.com menerbitkan sebanyak 7 berita dengan kategori perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI. Berita-berita tersebut berisi mengenai pernyataan dari pihak Majelis Ulama Indonesia terkait dengan proses perkembangan sertifikasi halal vaksin Covid-19 termasuk perumusan fatwa. Berita dalam kategori ini yang telah peneliti seleksi dari CNNIndonesia.com berjudul “MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19” yang terbit

pada tanggal 19 Oktober 2020 dan dengan judul “MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal” yang terbit pada tanggal 7 Desember 2020.

1. Berita Senin, 19 Oktober 2020. MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19

**Tabel 3.9**

**Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum dapat memastikan kehalalan vaksin Covid-19 karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal.
<i>Diagnose Causes</i>	Wakil Direktur LPPOM MUI mengatakan belum dapat menjawab halal atau tidaknya vaksin Covid-19 karena masih menunggu hasil pemeriksaan audit dari tim yang diberangkatkan ke Cina.
<i>Make Moral Judgement</i>	MUI mengatakan bahwa terdapat beberapa tahapan yang cukup panjang untuk mendapatkan sertifikasi halal vaksin Covid-19 dari MUI. Tahapan tersebut diantaranya memeriksa kehalalan bahan baku, kehalalan fasilitas yang digunakan, komitmen halal perusahaan serta melakukan uji otentifikasi di laboratorium.
<i>Treatment Recommendation</i>	Jika hasil uji kehalalan tidak sesuai maka akan diputuskan oleh komisi fatwa MUI termasuk bagaimana penggunaan vaksin Covid-19 jika produksinya tidak halal.

*Define problem* yang peneliti temukan pada berita pertama yang dituliskan oleh CNNIndonesia.com dalam kategori ini yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum dapat memastikan kehalalan vaksin Covid-19 karena harus memenuhi sejumlah persyaratan dalam proses sertifikasi halal. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf pertama :

*“Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum dapat memastikan kehalalan vaksin virus corona (Covid-19). Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal vaksin.”*

Selanjutnya **diagnose causes** yang dimuat oleh CNNIndonesia.com, peneliti melihat CNNIndonesia.com menuliskan penyebab berdasarkan keterangan dari Wakil Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati yakni masih menunggu hasil proses audit lapangan tim LPPOM MUI yang diberangkatkan ke Cina terkait halal atau tidaknya vaksin Covid-19. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keempat, yakni :

*“Kita masih menunggu audit dari tim yang pergi ke China. Jadi saat ini belum bisa jawab apakah halal atau tidak karena prosesnya belum berjalan, kita masih nunggu hasil pemeriksam”*

Kemudian **make moral judgement** yang terdapat dalam berita yang dituliskan CNNIndonesia.com, peneliti menemukan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, vaksin Covid-19 harus melalui proses yang cukup panjang diantaranya memeriksa kehalalan bahan baku, kehalalan fasilitas yang digunakan, komitmen halal perusahaan hingga uji otentifikasi di laboratorium. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf kelima :

*“...tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI cukup panjang. Pertama, MUI harus mengetahui kehalalan bahan baku dari produk yang digunakan. Kemudian melakukan penelusuran kehalalan fasilitas yang digunakan, dan menjamin komitmen perusahaan menyiapkan produk yang halal.”*

dan juga terdapat pada paragraf keenam, yakni :

*“Kemudian, LPPOM MUI melakukan uji otentifikasi di laboratorium. Uji otentifikasi ini bertujuan untuk menjamin tidak ada pemalsuan vaksin, sehingga keamanan vaksin juga terjamin.”*

Pada **treatment recommendation** dalam berita, CNNIndonesia.com menuliskan keterangan Wakil Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati bahwa jika hasil uji vaksin Covid-19 tidak sesuai, maka diputuskan dalam komisi fatwa MUI termasuk penggunaan vaksin Covid-19 jika proses produksinya tidak halal. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf ketujuh :

*"Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai, ini akan diputuskan oleh komisi fatwa. Kalau produksinya tidak halal, bagaimana penggunaannya itu akan ditentukan oleh Komisi Fatwa MUI,"*



2. Berita Senin, 7 Desember 2020. MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal

**Tabel 3.10**

**Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	MUI melalui Tim Komisi fatwa Hasannudin AF menyatakan akan membuka peluang penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac jika mengandung zat yang nonhalal.
<i>Diagnose Causes</i>	MUI masih merumuskan fatwa untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang dalam kondisi darurat tetap dapat digunakan meski terdapat kandungan non halal dan belum ditemukannya vaksin yang mengandung bahan halal.
<i>Make Moral Judgement</i>	Keputusan MUI terkait vaksin melibatkan banyak pihak seperti para ahli dan pemerintah untuk mendapatkan penjelasan dan memastikan belum ditemukan vaksin yang memiliki kandungan halal berdasarkan keterangan Hasannudin.
<i>Treatment Recommendation</i>	Hasannudin menekankan apabila belum ditemukan vaksin halal, Komisi Fatwa MUI akan melakukan sidang kembali untuk memutuskan vaksin tersebut dapat digunakan dalam kondisi darurat. Namun jika ditemukan vaksin halal maka penggunaannya harus diutamakan.

**Define problem** pada berita pertama CNNIndonesia dalam kategori perkembangan uji kehalalan vaksin Covid-19 oleh MUI menuliskan bahwa pihak Tim Komisi Fatwa MUI memperbolehkan penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac seandainya terdapat kandungan non halal. Peneliti menemukan define problem dalam berita tersebut pada paragraf pertama :

*“Tim Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF mengatakan pihaknya membuka peluang memperbolehkan penggunaan vaksin virus corona (Covid-19) buatan Sinovac seandainya vaksin tersebut mengandung zat yang tidak halal.”*

Selanjutnya pada **diagnose causes** peneliti melihat CNNIndonesia.com menuliskan keterangan bahwa karena dalam kondisi darurat dan belum ditemukan vaksin yang mengandung bahan halal, penggunaan vaksin non halal dapat digunakan. Pihak MUI masih merumuskan fatwa terkait vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Keterangan yang dituliskan Republika.co.id terdapat dalam berita pada paragraf kedua :

*“MUI sampai saat ini masih merumuskan fatwa untuk vaksin covid Sinovac yang telah tiba di Indonesia. Menurutnya, vaksin yang tidak halal tetap bisa digunakan karena saat ini Indonesia dalam kondisi darurat dan belum ditemukan vaksin yang mengandung bahan-bahan halal.”*

Kemudian pada **make moral judgement**, CNNIndonesia.com menuliskan pada berita berdasarkan keterangan dari anggota tim komisi fatwa MUI Hasannudin AF yang menegaskan keputusan kehalalan vaksin Covid-19 melibatkan banyak pihak diantaranya para ahli dan juga pemerintah untuk memastikan vaksin lain yang memiliki kandungan halal. Peneliti melihat penulisan dalam berita tersebut pada paragraf keempat, yakni :

*“Meski demikian, Hasanuddin menegaskan keputusan tersebut harus melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan penjelasan, seperti para ahli vaksin hingga pemerintah. Pelibatan pihak-pihak tersebut untuk benar-benar memastikan belum vaksin corona lain yang memiliki kandungan halal.”*

Selanjutnya peneliti melihat **treatment recommendation** dalam berita yang dituliskan oleh CNNIndonesia.com yaitu komisi fatwa MUI akan melakukan sidang kembali untuk memutuskan vaksin yang tidak halal dapat digunakan dalam kondisi darurat namun tetap mengutamakan vaksin halal apabila sudah ditemukan seperti yang tercantum dalam berita pada paragraf kelima :

*“Apabila belum ada vaksin halal, Ia mengatakan Komisi Fatwa MUI akan bersidang kembali untuk memutuskan vaksin tersebut boleh digunakan dengan pertimbangan kondisi darurat. Sebaliknya, jika sudah ditemukan vaksin yang halal maka harus diutamakan penggunaan vaksin halal tersebut.”*

### **c. Kategori Pendapat Pihak Ketiga**

Dalam kategori pendapat pihak ketiga, CNNIndonesia.com menerbitkan sebanyak 7 berita selama periode penelitian mengenai proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. CNNIndonesia.com menyajikan pada kategori ini dengan mengambil sudut pandang narasumber orang ketiga yang diantaranya Biofarma, Epidemiolog, Kemenristek, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan lain-lain terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19. Peneliti

memilih dua berita dari CNNIndonesia dalam kategori ini dengan judul “Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring” yang terbit pada tanggal 27 Oktober 2020 dan berita dengan judul “PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat” yang terbit pada tanggal 30 Desember 2020.

1. Berita Selasa, 27 Oktober 2020. Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring

**Tabel 3.11**

**Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Isu terkait vaksin Covid-19 yang mengandung babi menjadi momok di Indonesia menjelang kedatangan vaksin tersebut.
<i>Diagnose Causes</i>	Berdasarkan keterangan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo dalam proses pembuatan antigen dibutuhkan sel babi untuk menghasilkan komponen vaksin yang baik.
<i>Make Moral Judgement</i>	Masyarakat perlu memahami bahwa vaksin telah melalui pencucian dan penyaringan sehingga tidak ada kandungan babi didalamnya berdasarkan keterangan Dokter spesialis anak dari Yayasan Orangtua Peduli Windhi Kresnawati dan Dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe
<i>Treatment Recommendation</i>	Guna mencegah keadaan penyakit yang lebih berat dan berbahaya, Windhi menekankan untuk merujuk negara lain yang maju dan mayoritas muslim serta MUI yang sudah menyampaikan kehalalan dalam penggunaan vaksin Covid-19.

*Define problem* pada berita pertama CNNIndonesia.com dalam pendapat pihak ketiga menuliskan bahwa menjelang kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia, isu vaksin yang mengandung babi menjadi salah satu momok bagi masyarakat. Peneliti menemukan define problem dalam berita tersebut pada paragraf pertama :

*“Isu vaksin haram karena mengandung babi masih menjadi momok di Indonesia menjelang kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia.”*

CNNIndonesia.com menjelaskan **diagnose causes** atau penyebab dari permasalahan berdasarkan keterangan dari Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo yang menyatakan bahwa dalam pembuatan antigen dibutuhkan sel babi untuk menghasilkan panen komponen vaksin yang baik. Peneliti melihat CNNIndonesia.com menuliskannya pada paragraf kedua, yakni :

*“...Ahmad mengatakan dalam proses pembuatan antigen dibutuhkan sel babi untuk menghasilkan panen komponen vaksin yang baik.”*

Kemudian pada **make moral judgement**, CNNIndonesia.com menuliskan pada berita yakni keterangan ahli yakni Dokter spesialis anak dari Yayasan Orangtua Peduli Windhi Kresnawati dan *Dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe* yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi kandungan babi yang masuk kedalam vaksin karena telah melalui penyaringan yang cukup ketat. CNNIndonesia.com menuliskan pada berita secara rinci dalam berita pada paragraf kedelapan dan juga paragraf kesebelas :

*“Di sisi lain, Dokter spesialis anak dari Yayasan Orangtua Peduli Windhi Kresnawati mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada bagian babi yang masuk dalam vaksin”*

*“Dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe juga menjelaskan calon vaksin mengalami pencucian dan penyaringan hingga miliaran kali.”*

Selanjutnya peneliti melihat **treatment recommendation** dalam berita yang ditulis oleh CNNIndonesia.com berdasarkan keterangan Dokter spesialis anak dari Yayasan Orangtua Peduli Windhi Kresnawati yang merujuk pada negara lain yang mayoritas Muslim dan juga Majelis Ulama Indonesia yang telah menyampaikan kehalalan vaksin Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit yang lebih berat dan juga berbahaya seperti yang tercantum dalam berita pada paragraf kesepuluh:

*“Seandainya tetap tidak mau. Karena bersinggungan, kita merujuk negara lain yang maju yang mayoritas Muslim dan MUI yang sudah sampaikan halal. Untuk kebaikan dan dalam keadaan mencegah penyakit yang lebih berat dan berbahaya, vaksin halal.”*

2. Berita Rabu, 30 Desember 2020. PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat

**Tabel 3.12**

**Analisis Framing berita pada CNNIndonesia.com judul ‘PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat’**

Variabel	Keterangan
<i>Define Problem</i>	Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyatakan vaksin Covid-19 boleh digunakan dalam kondisi darurat jika ditemukan kandungan nonhalal.
<i>Diagnose Causes</i>	Berdasarkan hasil Munas Alim Ulama pada tahun 1997, dalam kondisi darurat penggunaan insulin dengan kandungan non halal boleh digunakan untuk penderita kencing manis.
<i>Make Moral Judgement</i>	MUI tidak ingin terburu-buru mengeluarkan fatwa halal vaksin Covid-19 dan pihaknya akan segera membahas hal tersebut dalam forum Bahtsul Masail.
<i>Treatment Recommendation</i>	Said mendukung MUI agar dapat bekerja maksimal dalam menentukan halal atau tidaknya kandungan dalam vaksin Covid-19 yang kemudian disusun dalam fatwa halal vaksin.

*Define problem* pada CNNIndonesia.com dalam kategori pendapat pihak ketiga menuliskan keterangan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 yang menyatakan bahwa memperbolehkan penggunaan vaksin Covid-19 dalam kondisi darurat jika terdapat kandungan non halal. Keterangan tersebut terdapat pada paragraf pertama dalam berita, yakni :

*“Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan bahwa vaksin virus corona (Covid-19) boleh digunakan bila nantinya ditemukan unsur tak halal karena dalam kondisi darurat.”*

CNNIndonesia.com menjelaskan *diagnose causes* pada berita tersebut berdasarkan keterangan dari Said yang menyatakan pada tahun 1997 memperbolehkan penggunaan insulin yang terdapat kandungan non halal untuk penderita kencing manis karena darurat. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf ketiga :

*“Ia mencontohkan bahwa hasil Munas Alim Ulama NU di Pesantren Qomarul Huda, NTB tahun 1997 lalu pernah menghasilkan keputusan memperbolehkan penggunaan insulin bagi penderita kencing manis karena darurat.”*

Selain itu CNNIndonesia.com juga menambahkan keterangan dengan mengutip hasil wawancara dengan Said yang terdapat pada paragraf kelima :

*"Seperti insulin itu kan yang paling bagus terdiri dari pankreasnya babi. Diputuskan oleh PBNU di Munas boleh."*

Kemudian pada *make moral judgement*, CNNIndonesia.com menuliskan pada berita berdasarkan keterangan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Miftachul Akhyar dalam menanggapi hal terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 pihaknya tidak ingin buru-buru dalam mengeluarkan fatwa halal vaksin dan akan segera membahasnya dalam forum Bahtsul Masail. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf kedelapan :

*"MUI mengaku tak mau buru buru mengeluarkan fatwa halal vaksin Covid 19. Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar mengatakan pihaknya pun akan segera membahasnya melalui forum Bahtsul Masail."*

Selanjutnya peneliti melihat *treatment recommendation* dalam berita yang ditulis oleh CNNIndonesia.com berdasarkan keterangan dari Ketua PBNU Said Aqil Siroj kepada Majelis Ulama Indonesia untuk dapat semaksimal mungkin menentukan apakah vaksin Covid-19 terdapat kandungan yang halal atau tidak yang kemudian dapat disusun fatwa halal vaksin. Keterangan tersebut terdapat dalam berita pada paragraf keenam :

*"Meski demikian, Said mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terus menggodok penyusunan fatwa halal vaksin virus Corona. Ia berharap MUI bisa semaksimal mungkin melihat apakah vaksin Corona yang tersedia saat ini sudah memiliki kandungan yang halal atau belum."*

## **B. Pembahasan**

Pemberitaan terkait proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada Republika.co.id dan CNNIndonesia.com dilakukan dengan mengunggah artikel berita melalui situs website mereka masing-masing. Sesuai dengan karakteristik media online, kedua media online tersebut menyajikan berita secara ringkas serta sederhana yang mengutamakan kecepatan penyampaian informasi berita. Kedua media online tersebut juga memiliki kolom komentar pada setiap artikel berita guna memudahkan interaksi kepada publik.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menganalisa sesuai dengan temuan yang dilakukan diatas terkait pemingkaiian oleh Republika.co.id dan CNNIndonesia.com mengenai sertifikasi

halal vaksin Covid-19. Analisa yang digunakan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan melihat bagaimana kedua media online tersebut mengkonstruksi isu tersebut. Peneliti akan menganalisis berita tersebut berdasarkan masing-masing ideologi media yang mana menurut Pawito (2014) ideologi media pada dasarnya adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak. Peneliti membahasnya pada setiap kategori sebagai berikut :

### **1. Kategori Arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin**

Pembingkaiian berita pada media online Republika.co.id terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 yang masuk dalam kategori arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan judul berita "Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan" menfokuskan pada pernyataan dari Ma'ruf Amin terkait landasan kedaruratan vaksin Covid-19 jika ditemukan kandungan nonhalal dalam vaksin. Ma'ruf yang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia non aktif dan saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI menjadikan Ma'ruf sebagai acuan narasumber utama terkait kehalalan vaksin Covid-19. Pada berita ini Republika.co.id memfokuskan pada arahan Ma'ruf kepada MUI terkait proses, peran serta tindakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu fokus berita yakni bagaimana penjelasan Ma'ruf terhadap landasan utama vaksin yang dikeluarkan MUI.

Pada berita, Republika.co.id mengutip informasi Ma'ruf secara langsung pada saat dialog dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro yang menonjolkan pernyataan Ma'ruf yang mengaitkan dengan vaksin meningitis yang difatwa haram MUI namun dapat digunakan dengan landasan kedaruratan. Mengenai masalah tersebut terdapat pernyataan tidak langsung dari narasumber "*Maruf berkaca pada temuan enzim nonhalal pada vaksin meningitis yang sempat difatwakan haram oleh MUI. Menurutnya, pada dasarnya vaksin sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk mencegah penyakit, bisa digunakan demi mencegah bahaya yang bisa dialami tubuh.*" Republika.co.id yang berideologi Islam menuliskan kalimat pada pernyataan narasumber yakni vaksin sebagai bentuk "ikhtiar" manusia. Ikhtiar merupakan bentuk atau perilaku untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mengerahkan segala kemampuan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang dalam hal ini ikhtiar untuk mencegah penyakit. Republika.co.id menekankan pernyataan ma'ruf

tersebut sebagai acuan yang diarahkan Ma'ruf agar dapat meyakinkan kepada masyarakat terutama yang beragama Islam dalam hal vaksinasi Covid-19.

Selanjutnya pada berita, Ma'ruf juga menegaskan bahwa walaupun terdapat kandungan nonhalal dalam vaksin harus ada penetapan dari MUI. *"Tapi dengan penetapan oleh lembaga, bahwa iya ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI"*. Serta dipertegas dengan pernyataan tidak langsung oleh Ma'ruf yang terdapat dalam berita. *"Mengingat pentingnya peran MUI dalam menentukan halal tidak vaksin Covid-19, Ma'ruf meminta pelibatan MUI dalam proses pengadaan vaksin. MUI juga diminta untuk mengawal proses riset hingga produksi nanti."* Terlihat pada kalimat *"...Ma'ruf meminta pelibatan MUI..."* menunjukkan bahwa Republika.co.id menekankan tindakan tegas Ma'ruf kepada MUI terhadap tindak lanjut kehalalan vaksin Covid-19. Ma'ruf yang merupakan Wakil Presiden dalam berita Republika.co.id menunjukkan bagaimana tindakan pemerintah dalam keterlibatan proses kehalalan vaksin Covid-19.

Berita kedua Republika.co.id dalam kategori arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjudul "Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin" memberitakan tentang penekanan Ma'ruf Amin yang meyakinkan kepada masyarakat terkait kinerja MUI dalam proses kehalalan vaksin Covid-19. Fokus berita Republika.co.id ini membahas kerja sama antara pemerintah dan MUI terhadap kinerja serta kemajuan MUI dalam proses kehalalan vaksin Covid-19. Narasumber dalam berita ini merupakan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi yang mewakili Ma'ruf dalam pemberian informasi. Republika.co.id mengutip informasi narasumber secara langsung Seperti pada dalam berita yang dituliskan berikut, *"Soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum ya karena MUI belum melaporkan, saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampai betul-betul fix, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," ujar Masduki.* dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Ma'ruf melalui juru bicaranya menyatakan keyakinan positif Ma'ruf yang merupakan Ketua Umum MUI non aktif pada saat itu atas kinerja MUI dalam urusan kehalalan vaksin Covid-19 sehingga mengurangi rasa khawatir masyarakat.

Selanjutnya dalam berita tersebut juga terdapat pernyataan juru bicara Wapres yang menekankan koordinasi yang cukup baik antara pemerintah dan juga pihak MUI. berikut pernyataannya. *"Jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin (MUI) tidak*



*berkoordinasi dengan pemerintah, pasti akan dilaporkan ke Wapres, lalu kapan pemerintah akan mengeluarkan (vaksin) kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan," ungkapnya. Berdasarkan kalimat "...tidak mungkin (MUI) tidak berkoordinasi dengan pemerintah.." Masduki yang mewakili Ma'ruf dalam berita Republika.co.id memberikan kepercayaan penuh terhadap kinerja MUI dalam proses kehalalan vaksin Covid-19 sehingga dalam berita digambarkan hubungan kerja sama yang baik antar keduanya.*

Republika.co.id mengkonstruksi kedua berita diatas dengan menonjolkan bagaimana hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan MUI terkait kehalalan vaksin Covid-19. Dalam berita, Republika.co.id juga mencerminkan bagaimana tanggung jawab yang baik oleh Ma'ruf yang merupakan seorang wakil presiden, Ketua Umum MUI sekaligus ulama untuk merespon permasalahan tersebut. Namun ideologi islam pada Republika.co.id ditonjokan dengan mengarahkan pembaca untuk memberikan kepercayaan yang penuh terhadap kinerja MUI dalam menangani proses kehalalan vaksin Covid-19 melalui informasi dari Ma'ruf sehingga dapat mengurangi kekhawatiran pembaca yang beragama Islam. Menurut Eriyanto dalam Sobur (2009: 61) teks, percakapan, dan lainnya sebagai bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.

Berita pertama media CNNIndonesia.com dalam kategori arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjudul "Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI". Berita ini memfokuskan pada pernyataan Ma'ruf yang apabila terdapat kandungan nonhalal dalam vaksin Covid-19 harus mendapatkan ketetapan dari MUI. CNNIndonesia.com dalam berita ini memiliki cukup kesamaan dengan berita pertama Republika.co.id dalam menampilkan informasi narasumber terkait penggunaan darurat vaksin serta penggunaan vaksin terdahulu dengan hal serupa. Pada kategori ini CNNIndonesia.com menyajikan berita dengan menuliskan pernyataan langsung serta tidak langsung dari narasumber. CNNIndonesia.com menonjolkan informasi Ma'ruf terkait penggunaan vaksin terdahulu berdasarkan pernyataan tidak langsung berikut. *"Berkaca dari vaksin meningitis itu, Ma'ruf menyebut vaksin yang dinyatakan tidak halal tetap boleh digunakan untuk mencegah dampak lain yang lebih berbahaya."*

Namun yang menjadi perbedaan yakni pada berita CNNIndonesia.com menuliskan informasi dari Ma'ruf melalui pernyataan tidak langsung. *"Ketua MUI itu turut menjelaskan, dalam ajaran Islam menjaga jiwa termasuk satu dari lima tujuan syariat, selain menjaga*

*agama.*” CNNIndonesia.com yang memiliki ideologi nasional menuliskan dalam berita “ajaran Islam menjaga jiwa termasuk satu dari lima tujuan syariat”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com menargetkan berita ini untuk pembaca agama Islam dengan mengutip ajaran islam melalui keterangan Ma’ruf. Terdapat juga pada pernyataan langsung oleh Ma’ruf yang dikutip dalam berita. “*Dalam kondisi normal, dia berkata menjaga agama harus dinomorsatukan. Namun, dalam kondisi darurat seperti pandemi, menjaga jiwa menurut dia harus diutamakan. "Karena apa? menjaga jiwa enggak ada alternatif, maka harus diutamakan. Dalam agama, kerjakan salat, ada kemudahan-kemudahan,"*. Dalam pernyataan tersebut CNNIndonesia.com menggambarkan solusi atas masalah tersebut dengan merepresentasikan narasumber dalam berita yakni Ma’ruf yang merupakan seorang ulama sekaligus perwakilan pemerintah dalam menyikapi permasalahan kehalalan vaksin Covid-19 melalui pemahaman yang berkaitan dengan ajaran agama Islam sehingga dapat mempengaruhi pembaca terutama yang beragama Islam untuk tidak khawatir terhadap kehalalan vaksin Covid-19.

Selanjutnya pada berita kedua CNNIndonesia dalam kategori ini berjudul “Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19” yang memfokuskan pada peran dan solusi Ma’ruf kepada MUI dalam penanganan Covid-19. Selain itu dalam berita ini CNNIndonesia.com juga menuliskan pada pernyataan resmi maruf yang melibatkan mui dalam penanganan pandemi covid 19 karena selama ini mui menjadi acuan umat islam di indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari terutama selama pandemi Covid-19. Pada berita ini CNNIndonesia.com memiliki persamaan dalam mengambil informasi Ma’ruf pada saat dialog dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro dengan menuliskan pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berita.

Pada berita ini yang terkait kehalalan vaksin, CNNIndonesia.com menuliskan tindakan pemerintah kepada MUI seperti dalam pernyataan berikut. “*Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,*”. Dalam keterangan tersebut CNNIndonesia.com menuliskan apa saja kinerja MUI melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses kehalalan vaksin Covid-19 yang disebutkan Ma’ruf. Pencapaian pemerintah dalam berita digambarkan dengan pelibatan

MUI dalam semua proses tersebut seperti yang terdapat pada kalimat. *"Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan..."*.

Pada berita dituliskan bagaimana dalam pernyataan Ma'ruf yang mempertegas vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat harus memiliki sertifikat halal dari MUI seperti pada pernyataan tidak langsung dalam berita. *"Ma'ruf menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah MUI."* Namun CNNIndonesia.com menuliskan kutipan pernyataan langsung dari Ma'ruf yang memberikan saran kepada MUI untuk mengeluarkan penetapan kondisi darurat apabila vaksin tidak halal sebagai solusi seperti dalam kalimat berikut. *"Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,"*.

Berdasarkan pembahasan kedua berita diatas konstruksi berita yang dilakukan CNNIndonesia.com menggambarkan citra positif pemerintah melalui tindakan serta saran Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh ulama dan juga wakil presiden untuk menjawab persoalan terkait kehalalan vaksin Covid-19. Namun dalam berita CNNIndonesia.com lebih menyoroti bagaimana saran serta solusi yang diberikan oleh Ma'ruf apabila vaksin tidak halal. Selain itu CNNIndonesia.com yang berideologi nasional mengutamakan pembaca yang beragama Islam pada berita diatas dengan melihat bagaimana pemilihan bahasa informasi dari narasumber yang disajikan dalam berita. Pemilihan kosa kata dan tatacara penyajian juga dapat mempengaruhi makna tentang suatu pemberitaan (Hamad, 2004: 12).

## **2. Kategori Perkembangan Uji Kehalalan Vaksin oleh MUI**

Berita pertama pada Republika.co.id dalam kategori perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI berjudul "MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin" berfokus pada Majelis Ulama Indonesia yang mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tenang apabila status vaksin Covid-19 belum halal. Republika.co.id memilih Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim sebagai narasumber dalam berita ini.

Fokus berita Republika.co.id dalam kategori ini yaitu perkembangan MUI dalam uji kehalalan vaksin serta mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang apabila vaksin mengandung bahan tidak halal. Dalam berita ini Republika.co.id mengutip pernyataan narasumber secara langsung dan juga tidak langsung. Dalam berita, Republika.co.id menonjolkan pernyataan

langsung narasumber yang berisi bahwa pihak MUI meyakinkan masyarakat dengan transparansi vaksin Covid-19 seperti dalam kalimat berikut. *“MUI akan transparan dengan vaksin Covid-19.”*

Selanjutnya dalam berita juga dituliskan pernyataan tidak langsung dari narasumber yang mengatakan bahwa dalam keadaan darurat vaksin yang memiliki status belum halal dapat digunakan secara hukum syariah seperti dalam kalimat. *“Secara hukum syariah, kata dia, suatu produk dalam keadaan darurat tetap boleh digunakan umat Islam meski statusnya belum halal.”* Dalam kalimat ini menunjukkan ideologi Islam yang melekat pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam membingkai berita. Penulisan kata *“hukum syariah”* yang ditekankan dalam kalimat memperlihatkan ideologi media dalam konstruksi berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang dalam hal ini seolah ingin membuka pikiran pembaca untuk tidak khawatir terhadap status kehalalan vaksin Covid-19 karena situasi darurat. Berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada paragraf terakhir berita menjelaskan apa saja tahapan tahapan yang dilakukan MUI dalam menguji kehalalan vaksin Covid-19 sesuai dengan keterangan narasumber sebagai berikut. *“Direktur LPPOM MUI mengatakan ada tiga hal penting untuk menentukan kehalalan vaksin. Yaitu terkait sumber atau bahan dalam proses produksi, perusahaan memiliki komitmen menggunakan peralatan, fasilitas serta prosedur produksi yang terjamin kehalalannya. Ketiga, ada otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium memastikan tidak ada kontaminasi kepaluan produksi vaksin.”* Berdasarkan keterangan tersebut [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menunjukkan bagaimana transparansi serta komitmen MUI terkait kinerjanya dalam uji kehalalan vaksin Covid-19.

Selanjutnya berita kedua [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam kategori ini berjudul *“MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19”* yang membahas tentang sejauh mana perkembangan yang dilakukan MUI dalam proses menguji kehalalan vaksin Covid-19. Adapun [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memilih narasumber dalam berita ini yakni Wakil Direktur LPPOM MUI Direksi Komunikasi Osmena Gunawan. Pada berita ini didominasi dengan pernyataan langsung narasumber yang dikutip [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Berita ini memfokuskan kepada perkembangan uji klinis yang dilakukan MUI sehingga belum dapat menyampaikan hasil kepada publik.

Pada berita ini [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menonjolkan alasan mengapa MUI belum menyampaikan hasil survei vaksin Covid-19 seperti yang disampaikan oleh narasumber pada kalimat berikut. *“Menurut dia, tim membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membawa*

*sampel vaksin dari hasil audit lapangan.*” Selain itu dalam berita juga dijelaskan alasan lain dari narasumber berdasarkan kutipan pernyataan berikut. *“Tim vaksin berupaya melakukan proses pemeriksaan yang intensif terkait vaksin yang hendak dibeli.”* Osmena dalam pernyataan ini menyebutkan kata “intensif” yang menunjukkan keseriusan MUI dalam menguji kehalalan vaksin Covid-19. Intensif menurut KBBI yaitu melakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus hingga memperoleh hasil yang optimal.

Republika.co.id juga menuliskan dalam berita keterangan Osmena yang menjelaskan bagaimana lanjutan kinerja MUI melalui tahapan yang akan dilakukan setelah melakukan uji kehalalan vaksin Covid-19 di China seperti pada pernyataan tidak langsung berikut. *“Tugas LPPOM MUI pun tidak akan selesai setelah melakukan audit lapangan di Cina. LPPOM MUI masih harus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak mengenai kemanfaatan vaksin hingga melakukan sidang fatwa halal.”* Pada kalimat tersebut kembali menekankan kata “Intensif” yang seolah menegaskan MUI bersungguh-sungguh dalam tahapan kehalalan vaksin Covid-19.

Konstruksi kedua berita diatas yang dilakukan Republika.co.id merepresentasikan citra positif MUI dalam upaya proses kehalalan vaksin Covid-19. Republika.co.id pada kategori ini menggambarkan usaha maksimal yang dilakukan MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal vaksin yang sehingga meyakinkan pembaca untuk memberi kepercayaan penuh kepada MUI bahwa vaksin Covid-19 akan difatwa halal, hal ini dilihat dari ideologi media yang ditunjukkan Republika.co.id dalam memilih informasi narasumber dan juga pemilihan kata yang digunakan dalam menulis berita diatas. Pada kategori ini Republika.co.id dalam beritanya menghindari perdebatan terkait isu vaksin yang mengandung bahan yang tidak halal dan lebih menekankan kepada bagaimana kinerja MUI. Hamad (2004) menjelaskan bahwa tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media, khususnya wartawan dalam membingkai sebuah pemberitaan yang berujung pada pembentukan citra yakni, pemilihan bahasa, fakta yang disajikan dan kesediaan memberi tempat.

Selanjutnya berita pertama CNNIndonesia.com dalam kategori perkembangan uji kehalalan vaksin oleh MUI berjudul “MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19” yang berfokus pada penjelasan MUI mengenai tahapan yang akan dilakukan dalam proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 termasuk sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Fokus berita

CNNIndonesia.com dalam kategori ini juga berisi alasan MUI belum memastikan kehalalan vaksin Covid-19 karena proses yang cukup panjang. CNNIndonesia.com memilih Wakil Direktur LPPOM MUI Direksi Eksekutif Muti Arintawati sebagai narasumber dalam berita ini. Berita ini disajikan oleh CNNIndonesia secara ringkas dan jelas dengan memuat informasi dari narasumber melalui pernyataan langsung dan tidak langsung pada berita. CNNIndonesia.com mengambil informasi narasumber pada saat konferensi pers secara daring oleh narasumber yang menyebutkan alasan mengenai MUI yang belum memastikan kehalalan vaksin Covid-19. CNNIndonesia.com menonjolkan alasan narasumber terkait kepastian kehalalan vaksin Covid-19 melalui keterangan tersebut melalui pernyataan langsung narasumber yang dituliskan dalam berita. *“Kita masih menunggu audit dari tim yang pergi ke China. Jadi saat ini belum bisa jawab apakah halal atau tidak karena prosesnya belum berjalan, kita masih nunggu hasil pemeriksaan.”*

Selain itu dalam berita CNNIndonesia.com juga menuliskan langkah yang akan dilakukan MUI apabila produksi vaksin tidak halal berdasarkan pernyataan narasumber sebagai berikut. *“Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai, ini akan diputuskan oleh komisi fatwa. Kalau produksinya tidak halal, bagaimana penggunaannya itu akan ditentukan oleh Komisi Fatwa MUI, ucapnya.* CNNIndonesia.com menekankan pernyataan narasumber yang menegaskan bahwa keputusan halal atau tidaknya dan bagaimana penggunaan vaksin Covid-19 akan diputuskan oleh Komisi Fatwa MUI. CNNIndonesia.com dalam berita ini juga menuliskan tahapan yang akan dilakukan MUI serta syarat yang harus dipenuhi vaksin Covid-19 untuk mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini CNNIndonesia seakan menekankan bahwa kinerja yang dilakukan MUI khususnya LPPOM MUI telah sesuai dengan standar syarat vaksin untuk mendapat sertifikat halal.

Berita selanjutnya dalam kategori ini berjudul “MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal’, CNNIndonesia dalam berita ini membahas mengenai tindakan MUI apabila vaksin Covid-19 terutama buatan Sinovac mengandung bahan yang tidak halal. Komisi Fatwa MUI dalam berita ini juga memberikan alasan serta solusi yang diberikan jika vaksin tidak halal. Adapun narasumber yang dipilih CNNIndonesia.com dalam mengambil informasi berita ini adalah Tim Komisi Fatwa MUI Hasannudin AF. MUI menyatakan bahwa

akan membuka peluang penggunaan vaksin Covid-19 dalam kondisi darurat apabila ditemukan kandungan yang tidak halal dalam vaksin.

Dalam berita ini CNNIndonesia.com menyajikan informasi yang dituliskan dengan pernyataan tidak langsung yang mendominasi seperti dalam pernyataan berikut. *“Menurutnya, vaksin yang tidak halal tetap bisa digunakan karena saat ini Indonesia dalam kondisi darurat dan belum ditemukan vaksin yang mengandung bahan-bahan halal.”* Seakan menegaskan pernyataan narasumber, CNNIndonesia.com menuliskan informasi narasumber secara langsung terkait penggunaan darurat vaksin Covid-19 seperti yang ada pada kalimat berikut. *“Nah, nanti misalnya kalau diputuskan haram, sebabnya itu dalam keadaan darurat bisa digunakan sementara sebelum ada vaksin covid yang halal,”*

Namun dalam berita dijelaskan alasan Komisi Fatwa MUI belum menerbitkan fatwa vaksin karena masih menunggu laporan hasil audit dari LPPOM MUI di China dengan menuliskan keterangan langsung dari narasumber berikut. *“Itu mestinya dilaporkan ke rapat komisi fatwa bila sudah selesai. Setahu saya sampai saat ini saya belum ada itu sampai sekarang.”* Dalam kalimat tersebut CNNIndonesia.com seakan menekankan Komisi Fatwa sangat bergantung pada hasil audit tim LPPOM MUI dalam menentukan halal atau tidaknya vaksin Covid-19. CNNIndonesia.com dalam berita ini juga kembali menuliskan fatwa vaksin Rubella yang mengandung bahan yang tidak halal namun boleh digunakan dalam keadaan darurat, CNNIndonesia.com seakan meyakinkan masyarakat bahwa hal tersebut dapat dilakukan serupa dengan vaksin Covid-19.

Berbeda dengan Republika.co.id, konstruksi yang dilakukan CNNIndonesia.com pada kategori ini menonjolkan opsi yang akan dilakukan MUI apabila terdapat kandungan yang tidak halal dalam vaksin Covid-19 dengan menampilkan informasi dari narasumber berupa alasan serta penjelasan dari pihak MUI terkait kehalalan vaksin. Dengan kata lain media mempunyai sudut pandang berbeda dengan media lainnya walaupun dalam satu peristiwa atau kejadian yang sama (Hamad, 2004: 11-12). Pada kedua berita diatas CNNIndonesia.com yang berideologi nasional seakan mengarahkan pembaca yang beragama Islam untuk tidak takut melakukan vaksinasi meskipun mengandung bahan yang tidak halal terlihat bagaimana CNNIndonesia.com memilih informasi dari MUI yang menonjolkan penjelasan berupa tahapan audit MUI di China hingga menuliskan fatwa vaksin terdahulu yang mengandung bahan nonhalal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pawito (2014: 6) yang menyatakan bahwa konsep ideologi media

sangat lekat dengan konsep-konsep lain seperti sistem keyakinan (*belief system*), prinsip gagasan (*basic way of thinking*), pandangan dunia (*worldviews*), dan nilai (*values*) yang diusung oleh media (Pawito, 2014: 6).

CNNIndonesia.com pada kategori ini juga cenderung membingkai MUI sebagai dua bagian yang berbeda antara LPPOM MUI dengan Komisi Fatwa namun saling bergantung satu sama lain dalam menentukan halal atau tidaknya vaksin Covid-19. Media dalam mengkonstruksi realitas sesuai dengan pemahaman mereka, media akan menuliskan berita dengan cara sudut pandang itu sendiri sehingga nantinya akan menentukan keberpihakan atas suatu peristiwa (Eriyanto, 2002: 32-39).

### **3. Kategori Pendapat Pihak Ketiga**

Pembingkaiian berita Republika.co.id yang masuk dalam kategori pendapat pihak ketiga berjudul “Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali” berfokus pada informasi dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog dr Dirga Sakti Rambe SpPD sebagai narasumber dalam berita yang menjelaskan bahwa vaksin mengandung babi mengalami penyaringan hingga miliaran kali. Fokus berita yang dituliskan Republika.co.id yaitu membahas mengenai kandungan dalam vaksin yang telah disaring berkali-kali meski mengandung bahan yang tidak halal sehingga aman digunakan. Republika.co.id menuliskan pernyataan narasumber baik secara langsung dan tidak langsung.

Pendapat pernyataan langsung narasumber yang ditonjolkan Republika.co.id dalam berita ditegaskan dalam kalimat berikut. *“Pada produk akhirnya sudah tidak lagi mengandung babi.”* Kemudian pada berita, Republika.co.id juga menuliskan informasi dari narasumber kepada masyarakat untuk tidak khawatir pada vaksin meski menggunakan enzim babi seperti pada kalimat berikut. *“Dirga mengungkapkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan vaksin yang proses pengembangannya memakai enzim babi.”* Republika.co.id dalam kalimat tersebut menunjukkan sependapat dengan ahli yang seolah mengajak pembaca untuk tidak khawatir dengan kandungan babi dalam vaksin.

Pada berita juga dituliskan keterangan narasumber yang mengatakan bahwa proses pembuatan vaksin dapat diupayakan cepat salah satunya pada saat pandemi Covid-19. Keterangan narasumber tersebut ditulis Republika.co.id untuk meyakinkan masyarakat bahwa



vaksin Covid-19 dapat diedarkan dengan efektif dan aman karena kondisi pandemi saat ini, seperti yang terdapat pada kalimat berikut. *“Hanya saja, pada situasi tertentu, proses pembuatan vaksin bisa diupayakan menjadi lebih cepat, tanpa mengabaikan aspek efektivitas dan keamanan. Pengecualian juga berlaku dalam merespons pandemi Covid-19 saat ini yang membutuhkan keberadaan vaksin dengan segera untuk melindungi masyarakat.”* Republika.co.id dalam berita ini bersifat netral dengan memilih narasumber serta informasi pada berita meskipun media ini berideologi Islam.

Berita kedua Republika.co.id pada kategori ini berjudul “MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal” yang berfokus pada MPR yang mengizinkan penggunaan vaksin Covid-19 apabila telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM RI dan sertifikasi halal dari MUI. Selain itu dalam berita ini juga menjelaskan apa saja tahapan yang akan dilakukan MUI setelah melakukan audit lapangan di China terkait fatwa halal vaksin Covid-19. Republika.co.id memiliki dua narasumber dalam mengambil informasi berita ini yakni Anggota MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si dan juga Ketua MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh.

Republika.co.id pada berita ini didominasi dengan pernyataan langsung narasumber yang menonjolkan kepedulian MPR terhadap masyarakat seperti pada kalimat berikut. *“Izin-izin tersebut sangat penting, sebab akan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meminimalisir keengganan dan ketakutan rakyat untuk divaksinasi.”* Berdasarkan keterangan tersebut, Republika.co.id mencerminkan citra pemerintah yang positif dengan memperdulikan kenyamanan masyarakat terkait penggunaan vaksin Covid-19. Pernyataan tersebut juga dipertegas dengan pernyataan langsung dari narasumber berikut. *“Ini mesti benar-benar diperhatikan secara serius sebab pemerintah memang bertanggung jawab memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat.”*

Selanjutnya dalam berita juga dituliskan alasan mengapa pemerintah masih menunggu izin penggunaan darurat BPOM RI dan sertifikasi halal MUI sehingga belum dapat mengeluarkan izin edar vaksin Covid-19 terlihat dari yang dituliskan Republika.co.id berikut. *“...muncul fakta bahwa semua perizinan baik itu EUA dan sertifikasi halal belum bisa dikeluarkan, sebab semuanya masih dalam proses. Artinya, vaksin ini belum bisa atau belum boleh diedarkan di Indonesia.”* Hal tersebut menunjukkan izin edar vaksin dari pemerintah sangat bergantung pada

perizinan tersebut termasuk sertifikasi halal vaksin Covid-19. Kemudian pada berita, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) juga menuliskan tindakan tegas MPR kepada BPOM RI dan MUI, keterangan tersebut terdapat dalam kalimat berikut. *“Kurniasih juga menekankan, dalam proses pemenuhan semua perizinan tersebut agar transparan dan independen. “Saya mengajak BPOM dan MUI untuk memahami keadaan darurat seperti ini, rakyat sangat membutuhkan vaksin agar kehidupan mereka berjalan normal kembali.”* [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memilih kata “transparan” dan “independen” untuk memberi kesan tegas MPR dengan menggambarkan kata tersebut sebagai bentuk yang ideal dalam menangani vaksinasi Covid-19 yang ditujukan kepada kinerja BPOM RI dan MUI.

[Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang memiliki ideologi Islam memilih Ketua Umum Pusat MUI sebagai narasumber kedua dalam berita ini yang menjelaskan bagaimana proses tahapan keterlibatan MUI dalam proses pengadaan vaksinasi Covid-19. Dalam berita ini [Republika.co.id](http://Republika.co.id) kembali menggambarkan citra positif MUI dengan menuliskan pernyataan dari narasumber berikut. *“Pada intinya, MUI sampai detik ini tetap komit memberikan prioritasnya membahas aspek kehalalan vaksin Covid-19,” terangnya.* Pada pernyataan *“...MUI sampai detik ini tetap komit”* semakin menegaskan bahwa MUI serius dalam dalam memprioritaskan kehalalan vaksin Covid-19.

Konstruksi berita yang dilakukan pada kedua berita diatas menunjukkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menunjukkan sikap netral dalam pemilihan narasumber berita meskipun media ini berideologi Islam. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada berita pertama seolah mengajak masyarakat terutama yang beragama Islam untuk tidak khawatir terhadap vaksin Covid-19 karena telah disaring berkali-kali dengan mengambil informasi dari ahli vaksinolog. Menurut Hamad (2004: 16) dalam meringkai sebuah berita pemilihan satu narasumber yang dilakukan wartawan tentunya sesuai hasil pertimbangan terlebih dalam mengulas sebuah realitas, penggunaan kata maupun simbol ditentukan wartawan itu sendiri.

Sedangkan pada berita kedua [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan citra positif MPR yang mengutamakan masyarakat dalam izin edar vaksin Covid-19. Sama dengan kategori sebelumnya, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) kembali menggambarkan citra positif pemerintah dalam hal ini MPR terutama terkait kehalalan vaksin covid-19. Namun [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menonjolkan ideologi islam dalam memilih Ketua Umum Pusat MUI sebagai narasumber kedua dengan kembali

menggambarkan citra yang baik dari MUI mengenai keterlibatannya dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurut Antonio Gramsci dalam Sobur (2009: 30) media merupakan sarana penyebaran ideology penguasa, dalam mengontrol wacana publik dan alat legitimasi.

Berita pertama CNNIndonesia.com pada kategori ini berjudul “Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring” yang berfokus pada penjelasan ahli tentang bagaimana proses pembuatan vaksin Covid-19 hingga kandungan babi didalamnya dapat hilang setelah disaring. CNNIndonesia dalam berita ini memilih tiga narasumber sekaligus yang ahli dalam bidangnya masing-masing yakni Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo, Dokter spesialis anak dari Yayasan Orangtua Peduli Windhi Kresnawati dan Dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe. Dalam berita ini CNNIndonesia.com menampilkan pernyataan langsung narasumber dengan menonjolkan informasi bagaimana proses serta tahapan vaksin covid-19 dan juga solusi yang diberikan.

Dalam berita ini CNNIndonesia.com menuliskan informasi yang didominasi dari penjelasan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo sebagai narasumber utama yang menjelaskan tahapan bagaimana proses pembuatan vaksin serta kandungan babi didalamnya seperti pada pernyataan berikut. *“Ahmad mengatakan dalam proses pembuatan antigen dibutuhkan sel babi untuk menghasilkan panen komponen vaksin yang baik.”* Pernyataan tersebut menjelaskan alasan mengapa dalam proses pembuatan vaksin bersinggungan dengan kandungan babi.

Namun CNNIndonesia.com menuliskan penjelasan Ahmad yang menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi kandungan babi seperti pada pernyataan berikut. *“Oleh karena itu, Ahmad menuturkan tidak ada yang namanya 'vaksin babi', antigen vaksin adalah protein dari kuman seperti virus atau bakteri.”* Pernyataan tersebut kembali dipertegas CNNIndonesia.com dalam keterangan Ahmad berikut. *“Dalam proses pemurnian bertingkat, kandungan final dari vaksin sudah tidak terdeteksi lagi tripsin babi. Kalau tidak terdeteksi lalu haramnya di mana.”*

Untuk mempertegas informasi dalam berita, CNNIndonesia mengambil sudut pandang lain dari Dokter spesialis anak dari Yayasan Orangtua Peduli Windhi Kresnawati sebagai narasumber kedua yang memberikan saran kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam menyikapi vaksinasi Covid-19 seperti pernyataan berikut. *“Seandainya tetap tidak mau. Karena bersinggungan, kita merujuk negara lain yang maju yang mayoritas Muslim dan MUI yang sudah sampaikan halal. Untuk kebaikan dan dalam keadaan mencegah penyakit yang*

*lebih berat dan berbahaya, vaksin halal.*” Berdasarkan kalimat tersebut CNNIndonesia seakan memberikan pilihan untuk pembaca agar dapat merubah pandangan terhadap kehalalan vaksin Covid-19.

Selanjutnya CNNIndonesia mempunyai kesamaan dengan Republika.co.id dalam memilih vaksinolog Dirga Sakti Rambe sebagai narasumber ketiga pada berita. CNNIndonesia menuliskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena vaksin sudah tidak mengandung babi dengan menekankan keterangan narasumber berikut. *"Pada produk akhirnya sudah tidak lagi mengandung babi. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir semua vaksin yang pada proses pembuatannya bersinggungan dengan enzim babi itu tertulis jelas pada kemasannya," ujar Dirga.*

Berita kedua CNNIndonesia.com dalam kategori ini berjudul “PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat” yang memfokuskan pada respon Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait kehalalan vaksin Covid-19. Selain itu fokus berita pada CNNIndonesia.com dalam kategori ini menonjolkan pada keterangan narasumber PBNU yang memperbolehkan penggunaan vaksin covid-19 apabila mengandung bahan yang tidak halal karena hal serupa pernah terjadi sebelumnya pada vaksin penyakit lainnya. CNNIndonesia memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj sebagai narasumber utama serta menuliskan pernyataan langsung narasumber dalam berita yang menonjolkan PBNU yang memperbolehkan penggunaan vaksin Covid-19 jika mengandung bahan yang tidak halal dalam kondisi darurat sesuai dengan penulisan pernyataan langsung narasumber yang dituliskan CNNIndonesia.com berikut. *"Tapi yang dharar itu apa saja boleh. Karena darurat. Apa aja boleh. Misalkan, misalkan nanti mentoknya [vaksin] ada unsur yang tak halal, boleh, boleh," kata Said.* CNNIndonesia.com menuliskan pengulangan kata “misalkan” dan “boleh” yang disebutkan narasumber yang seakan menunjukkan sikap tegas PBNU terkait penggunaan vaksin meski terdapat kandungan yang tidak halal.

CNNIndonesia dalam menegaskan pernyataan diatas menuliskan keterangan narasumber hasil Munas terdahulu yang memperbolehkan penggunaan insulin yang mengandung babi seperti pada pernyataan narasumber berikut. *"Seperti insulin itu kan yang paling bagus terdiri dari pankreasnya babi. Diputuskan oleh PBNU di Munas boleh," kata Said.* CNNIndonesia menekankan kepada pembaca untuk tidak ragu terhadap penggunaan vaksin Covid-19 karena hal serupa pernah terjadi pada vaksin-vaksin penyakit lainnya yang pernah

diputuskan dengan alasan kondisi darurat. Kemudian dalam berita juga dituliskan harapan PBNU kepada MUI berdasarkan pernyataan berikut. *“Ia berharap MUI bisa semaksimal mungkin melihat apakah vaksin Corona yang tersedia saat ini sudah memiliki kandungan yang halal atau belum.”* Terlihat pada kalimat tersebut PBNU ingin MUI memastikan kehalalan vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini.

Untuk menambahkan sudut pandang lain dalam berita, CNNIndonesia.com menuliskan informasi dari pihak MUI yakni Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar dan Ketua MUI Asrorun Niam berupa alasan serta kendala dalam proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. Pernyataan tersebut ditegaskan pada keterangan narasumber berikut. *“MUI mengaku tak mau buru buru mengeluarkan fatwa halal vaksin Covid 19.”* Adapun dalam berita kendala MUI yang belum mengeluarkan sertifikasi halal karena dokumen terkait bahan vaksin Sinovac belum terpenuhi seperti pada pernyataan berikut. *“Ketua MUI Asrorun Niam membeberkan kendala bahwa Sinovac, produsen vaksin Covid-19, masih belum melengkapi dokumen untuk proses sertifikasi halal.”*

Berdasarkan kedua berita diatas, pada kategori ini CNNIndonesia menunjukkan sikap netral dalam memilih narasumber dan informasi berita. Pada berita pertama CNNIndonesia.com memilih tiga narasumber berupa ahli dengan latar belakang berbeda yang seakan meyakinkan pembaca untuk tidak takut penggunaan vaksin meski mengandung babi termasuk dampak yang diberikan. CNNIndonesia menuntun pembaca khususnya yang beragama islam untuk menentukan pilihan dengan yakin terhadap keamanan vaksin Covid-19. Berita CNNIndonesia.com ini memiliki kesamaan konstruksi berita dengan kedua kategori sebelumnya yang kembali menonjolkan informasi dari narasumber yang memperbolehkan penggunaan vaksin Covid-19 meski mengandung bahan yang tidak halal. Fakta-fakta yang dipilih wartawan akan membuat sebuah berita sehingga akan menarik khalayak untuk dibaca. Konstruksi sosial akan menghasilkan sebuah berita yang melibatkan pandangan, nilai-nilai dari wartawan atau media dan ideologi (Eriyanto, 2002: 29).

### **C. Perbandingan Antar Media**

Setelah kedua media online yaitu [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) diteliti, masing-masing media memiliki perbedaan pendekatan dan fokus berita pada setiap pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19. Kedua media online tersebut dalam penelitian ditemukan perbedaan dalam menyajikan berita sesuai dengan masing-masing sudut pandang media. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang memiliki ideologi Islam berdasarkan sejarah serta visi media memiliki jumlah berita yang cukup banyak yakni sebanyak 48 artikel yang membahas mengenai sertifikasi halal vaksin Covid-19 dibandingkan dengan [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) sebanyak 24 artikel berita.

Dilihat dari sudut pandang pemerintah melalui informasi Ma'ruf Amin, kedua media online tersebut sama-sama memberikan citra yang baik dari pemerintah dalam mengutamakan kehalalan vaksin Covid-19, meskipun memiliki narasumber yang sama, kedua media online ini memiliki perbedaan dalam menonjolkan informasi dilihat dari penulisan pernyataan langsung pada kedua media online tersebut. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) cenderung menonjolkan hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui beberapa pernyataan dari Ma'ruf Amin. Hal tersebut memiliki korelasi ideologi yaitu kepemilikan media pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang saat ini dimiliki oleh Erick Thohir seorang pengusaha yang juga menjabat sebagai menteri BUMN sehingga [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan citra pemerintahan yang baik dalam berita. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam kategori ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu oleh Hakiki (2019) yang membahas mengenai status kehalalan vaksin MR dimana dalam penelitian tersebut [Republika.co.id](http://Republika.co.id) cenderung membahas status halal vaksin melalui bingkai agama dengan berfokus pada masalah agama sedangkan dalam penelitian ini, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) cenderung menonjolkan bagaimana bingkai pemerintah terkait status halal vaksin. Informasi lain dari Ma'ruf yang ditonjolkan oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yaitu kepercayaan penuh atas kinerja MUI dalam kehalalan vaksin yang seolah menggiring opini publik bahwa status halal vaksin merupakan tanggung jawab MUI.

Sedangkan sudut pandang pemerintah pada berita [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) digambarkan dengan citra yang baik, hal tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naqqiyah (2020) yang membahas pembingkai media online terkait kasus pandemi Covid-19 dimana pada penelitian tersebut [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) lebih menonjolkan peran positif pemerintah sehingga membentuk opini yang baik pada khalayak. Ideologi pada

CNNIndonesia.com pada berita ditonjolkan pada pernyataan Ma'ruf terkait saran serta solusi apabila vaksin tidak halal. CNNIndonesia.com yang merupakan bagian dari media luar cenderung menggiring publik untuk tidak mempermasalahkan kehalalan vaksin.

Selanjutnya pada sudut pandang MUI pada berita yang diteliti kedua media online tersebut memiliki perbedaan dalam memilih narasumber. Republika.co.id memilih Ketua dan Wakil Ketua Direksi Komunikasi LPPOM MUI sedangkan CNNIndonesia.com memilih Wakil Ketua Direksi Eksekutif LPPOM MUI dan Tim Komisi Fatwa MUI. Republika.co.id menggambarkan MUI dengan kinerja yang baik dalam menguji kehalalan vaksin sehingga ideologi islam yang ditonjolkan Republika.co.id dengan menuliskan informasi narasumber yang seolah menggiring opini pembaca bahwa vaksin yang telah diuji oleh MUI akan pasti difatwa halal. Republika cenderung menghindari perdebatan terkait isu vaksin yang tidak halal menghindari perdebatan terkait isu vaksin yang mengandung bahan yang tidak halal dan lebih menekankan kepada bagaimana kinerja MUI. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haloho (2020) yang berjudul Konstruksi Kegagalan Imunisasi Mr Tahap Kedua Dalam Pemberitaan Media Online yang menjelaskan bahwa Republika online cenderung menghindari perdebatan terkait pro kontra haram/halal vaksin dalam pandangan Islam.

Sedangkan sudut pandang MUI dalam berita CNNIndonesia cenderung menonjolkan informasi berupa rencana, solusi serta saran dari narasumber terkait perkembangan status halal vaksin Covid.19. CNNIndonesia.com mengambil sudut pandang dari LPPOM MUI dan Tim Komisi Fatwa MUI pada beritanya dengan kembali menonjolkan informasi terkait penggunaan vaksin apabila mengandung bahan yang tidak halal.

Pada sudut pandang pihak ketiga, kedua media online tersebut memiliki perbedaan dalam pemilihan informasi serta narasumber. Republika.co.id cenderung netral dengan menghindari pembahasan sudut pandang agama terkait status halal vaksin Covid-19 dan memilih narasumber pihak ketiga yaitu ahli vaksinolog dan juga anggota MPR. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Faadhilah (2018) yang membahas mengenai analisis framing status sertifikasi hala vaksin MR. Pada penelitian tersebut, Republika.co.id membingkai berita dengan menekankan bahwa sertifikasi halal vaksin yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kepentingan umat islam namun Republika.co.id melihat

masalah ini melalui berbagai sudut pandang. Sedangkan citra MPR sebagai pihak ketiga terkait kehalalan vaksin Covid-19 cukup baik digambarkan pada berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id).

Berita CNNIndonesia.com pada sudut pandang pihak ketiga memiliki beragam informasi narasumber baik dari segi sudut pandang medis maupun agama. Dalam beritanya, CNNIndonesia memilih berbagai ahli medis dan ketua PBNU dengan kembali menekankan opsi penggunaan vaksin apabila mengandung bahan yang tidak halal. Meskipun media ini berafiliasi dengan media asal Amerika Serikat, CNNIndonesia.com memilih respon organisasi Islam yakni PBNU yang menegaskan bahwa dalam kondisi darurat vaksin boleh digunakan meski mengandung bahan yang tidak halal dengan menonjolkan informasi vaksin terdahulu.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) mengenai pemberitaan sertifikasi halal vaksin Covid-19 selama periode Oktober – Desember 2020, inilah uraian hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan penulis yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pemberitaan terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id) lebih mengangkat bagaimana kerja sama yang cukup baik antara pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penanganan pandemi Covid-19. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang berideologi Islam mengarahkan pembaca untuk yakin bahwa vaksin yang sedang di uji oleh pihak MUI akan difatwa halal. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam beritanya juga menggambarkan citra yang positif terhadap kinerja MUI dalam proses sertifikasi halal vaksin Covid-19, hal tersebut dilihat dari bagaimana [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memilih narasumber serta informasi berita.

Bingkai berita yang dilakukan [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) terkait sertifikasi halal vaksin Covid-19 cenderung menonjolkan solusi yang diberikan pemerintah maupun pihak MUI terkait penggunaan vaksin apabila vaksin mengandung bahan yang tidak halal. Hal tersebut dilihat dari bagaimana [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) memilih fakta-fakta serta terkait vaksin baik secara sains maupun secara agama. [CNNIndonesia.com](http://CNNIndonesia.com) memilih narasumber dari berbagai macam latar belakang seperti para ahli, ulama hingga pemerintah untuk meyakinkan pembaca bahwa kehalalan vaksin bukan masalah utama dan vaksin tetap aman digunakan pada umat Islam meski mengandung bahan yang tidak halal.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada objek penelitian yang diteliti yang dimana masih banyak media online lainnya yang memberitakan mengenai sertifikasi halal vaksin Covid-19. Selain itu penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan diantaranya hasil analisis yang tersaji masih banyak mengandung unsur kesubjektivitasan dari penulis.

### **C. Saran**

1. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menghubungkan dengan peristiwa lain yang berkaitan seperti politik dan juga bidang kesehatan lainnya.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti objek media lain yang lebih banyak agar data berita yang dihasilkan lebih variatif dan terkumpul hasil yang lebih baik.
3. Saran untuk kedua media online tersebut untuk tetap bersifat objektif dalam memilih narasumber serta menyajikan informasi dari berbagai macam sudut pandang agar pembaca dapat menilai dan memutuskan hasil terhadap suatu peristiwa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group.
- Eriyanto. (2011). *Analisis framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi realita politik dalam media massa*, Jakarta: Granit.
- Hidayat, Dedy N. (2000). *Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia.
- Keller, Anett. (2009). *Tantangan Dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*. Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.
- Kriyantoro, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- McQuail, Dennis. (1994). *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi individu hingga massa*. Jakarta: Kencana.
- Norris, P., Curtice, J., Sanders, D., Scammel, M., & Semetko, H.A. (1999). *On Message: Communicating the Campaign*. London : SAGE Publications.
- Ritzer, George. (2010). *Teori sosiologi modern*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Sobur, Alex. (2006). *Semiotika komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta : LkiS

### **Skripsi :**

Faadhilah, Rifa. (2018). *Analisis Framing Berita Status Sertifikasi Halal Vaksin Measles Rubella pada Republika.co.id dan Kompas.com*. Skripsi. Universitas Telkom.

Hakiki, A. W. D. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin Mr (Measles Rubella) Antara Pemerintah Dan Mui Dalam Portal Media Online Kompas.Com Dan Republika.Co.Id Periode Agustus 2018*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sofian, Arik. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Covid – 19 (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Media Online Koran.tempo.co Edisi Maret 2020)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### **Jurnal :**

Haloho, Heppy N.Y. (2020). *Konstruksi Kegagalan Imunisasi Mr Tahap Kedua Dalam Pemberitaan Media Online. Jurnal Populika Volume 8, Nomor 1, Januari 2020.*

Muttaqin, Ahmad. (2012). *Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa. Journal komunika Vol.6 No.2 Juli - Desember 2012 pp.*

Naqqiyah, Maulidatus Syahrotin. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Cnn Indonesia.Com Dan Tirto.Id Mengenai Kasus Pandemi Covid-19. Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam Volume 03, Issue 1, Agustus 2020.*

Pawito. (2014). Meneliti Ideologi Media : *Catatan Singkat. Jurnal Komunikasi Profetik, Vol. 7 No. 1 April 2014.*

Siswanti, Netty. (2019). Analisis Framing Media: Studi Komparatif Media Online “Cnn” Dan “Kompas” Terkait Fenomena Kemanusiaan Di Al-Aqsa Periode 20 - 23 Juli 2017. *Jurnal Riset Komunikasi Jurkom Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.*

#### **Internet :**

BBC News. *Vaksin: Sepenting apakah kehalalan bagi program vaksinasi Covid-19?*. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55584618> diakses pada tanggal 22 Juli 2021

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). *Peta Sebaran Covid- 19*. Diambil dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> diakses pada tanggal 13 Januari 2021

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). *Edukasi Masyarakat Umum Mengapa Vaksinasi Covid-19 Diperlukan*. Diambil dari <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/mengapa-vaksinasi-covid-19-diperlukan> Diakses pada 22 Juli 2021

Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, (2017). *Sertifikat Halal MUI*. Diambil dari <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui> diakses pada tanggal 13 Januari 2021

“Pandemi Covid-19”, Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19) diakses pada tanggal 14 Januari 2021

“Profil Republika.co.id”. <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada tanggal 14 Januari 2021

“Profil CNNIndonesia.com”. <https://www.cnnindonesia.com/tentang-kami> diakses pada tanggal 14 Januari 2021

“Turner dan Transmedia Luncurkan Situs CNN Indonesia”. <https://www.wartaekonomi.co.id/read36681/turner-dan-transmedia-luncurkansitus-cnn-indonesia.html> diakses pada 23 Juli 2021.



# LAMPIRAN



## Lampiran Berita Republika.co.id

### 1. Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan

Sabtu 17 Oct 2020 04:28 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Muhammad Hafil

#### **Wapres Pastikan Vaksin Covid Bisa Digunakan'**

*REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Maruf Amin memastikan bahwa vaksin Covid-19 bisa digunakan oleh masyarakat dengan landasan kedaruratan. Dengan prinsip ini, maka vaksinasi massal tetap bisa dilakukan meski nantinya ditemukan ada kandungan nonhalal di dalam vaksin Covid-19.*

*Maruf berkaca pada temuan enzim nonhalal pada vaksin meningitis yang sempat difatwakan haram oleh MUI. Menurutnya, pada dasarnya vaksin sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk mencegah penyakit, bisa digunakan demi mencegah bahaya yang bisa dialami tubuh.*

*"Seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal. Tetapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan, maka bisa digunakan. Walaupun tidak halal, (tapi) secara darurat," ujar Maruf Amin dalam dialog dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro, Jumat (16/10).*

*Namun yang perlu jadi catatan, ujar Maruf, umat Islam di Indonesia tetap butuh landasan ulama terkait penggunaan vaksin Covid-19 nanti. Maksudnya, apabila ditemukan kandungan nonhalal dalam vaksin Covid-19 nantinya, maka MUI tetap perlu menerbitkan fatwa atau ketetapan terkait prinsip kedaruratan vaksin.*

*"Tapi dengan penetapan oleh lembaga, bahwa iya ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI," ujar Maruf.*

*Mengingat pentingnya peran MUI dalam menentukan halal tidak vaksin Covid-19, Ma'ruf meminta pelibatan MUI dalam proses pengadaan vaksin. MUI juga diminta untuk mengawal proses riset hingga produksi nanti.*

*"Kemudian melalui audit di pabriknya. Bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT. Dan kemudian akan terus terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas. Saya kira MUI sudah terlibat sejak awal dan beberapa kali pertemuan ikut dilibatkan," ujar Maruf.*

*Pemerintah memang terus mengupayakan pengadaan vaksin Covid-19 bisa lebih cepat. Targetnya, vaksin impor bisa tiba paling cepat November mendatang. Sementara vaksin yang sepenuhnya dibuat di dalam negeri, baru akan masuk tahap uji klinis mulai awal 2021 mendatang.*



*Vaksin merah putih, non-impor, dikerjakan oleh enam institusi yang berbeda. Keenam institusi tersebut, yakni Lembaga Eijkman, LIPI, UI, UGM, ITB, dan Unair, menggunakan platform penelitian yang berbeda-beda. Itulah yang membuat time line riset dari masing-masing institusi juga bisa berbeda.*

*Perlu diketahui, proses pembuatan vaksin mulai dari riset sampai dianggap layak untuk produksi massal ternyata tidak sederhana. Setidaknya ada enam tahapan, dengan masing-masing tahapnya cukup panjang, harus dilalui sebelum akhirnya vaksin Covid-19 bisa diproduksi massal dari disuntikkan kepada masyarakat luas.*

## 2. Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin

Jumat 06 Nov 2020 12:09 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

### **‘Wapres Yakin MUI Sangat Berhati-hati Soal Kehalalan Vaksin’**

*REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menunggu laporan hasil terkait kehalalan vaksin Covid-19. Hal itu disampaikan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat ditanyai mengenai perkembangan informasi tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengecek kehalalan vaksin ke China.*

*"Soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum ya karena MUI belum melaporkan, saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampai betul-betul fix, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," ujar Masduki saat video conference dengan wartawan, Jumat (6/11).*

*Masduki menilai, belum dilaporkan soal kehalalan vaksin karena hal tersebut sangat sensitif sehingga perlu ekstra hati-hati dalam proses pemeriksaannya. Tim MUI yang diberangkatkan ke China juga adalah tim khusus yang kompeten di bidang vaksinasi maupun kesehatan serta urusan fatwa.*

*"Karena ini tidak sederhana, ini verifikasi ke China itu kan ada dua orang, satu yang punya keahlian di bidang kehalalan produk ya dan itu memang orang-orang yang ahli di bidang itu, yang satu adalah yang berkaitan dengan fatwa. Jadi orang yang mengerti urusan keagamaan, fatwa halal seperti apa," ujarnya.*

*Ia menjelaskan, setelah pulang dari China juga, tim tidak langsung menyimpulkan soal kehalalan vaksin tetapi akan dilakukan sidang fatwa dan dilaporkan ke LPPOM MUI.*

*"Jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin (MUI) tidak berkoordinasi dengan pemerintah, pasti akan dilaporkan ke Wapres, lalu kapan pemerintah akan mengeluarkan (vaksin) kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan," ungkapnya.*

*Ia menegaskan masalah kehalalan ini faktor terpenting sebelum melakukan vaksin Covid-19. "Karena kalau nggak, kita tahu sendiri ini bisa rawan karena banyak sekali misalnya orang-orang yang memplesetkan, (kehalalan ini penting) sehingga*

*ketika vaksinasi nasional dimulai sudah tidak ada lagi keraguan atau pertanyaan soal kehalalan vaksin," ungkapnya.*

### 3. MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan

Jumat 30 Oct 2020 16:04 WIB

Rep: Indira Rezkisari

#### **‘MUI Ingatkan Publik Tetap Tenang Soal Kehalalan Vaksin’**

*REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia mengingatkan masyarakat tetap tenang dan tidak mengembangkan narasi berlebihan terkait status kehalalan vaksin Covid-19. Karena dalam keadaan darurat produk tertentu dapat dipakai meski status belum halal.*

*Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim di Jakarta, Jumat (30/10), mengatakan MUI akan transparan dengan vaksin Covid-19.*

*Secara hukum syariah, kata dia, suatu produk dalam keadaan darurat tetap boleh digunakan umat Islam meski statusnya belum halal. Hal itu sebagaimana keadaan mendesak saat pandemi Covid-19 yang belum kunjung ada obat atau vaksinnya.*

*"Tentang kebolehan dipakai karena terdorong kedaruratan dan dihitung. Saya kira ini panduan hukum. Insya Allah hasil fatwa vaksin Covid-19 memang sesuai dengan sebenar-benarnya dengan panduan syariat Islam," kata dia.*

*Lukman mencontohkan ada Fatwa MUI yang memperbolehkan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) meski mengandung babi. Pembolehan itu karena alasan darurat. Hal serupa tentu dapat berlaku untuk fatwa vaksin Covid-19 jika memang ditetapkan tidak halal.*

*Sebelumnya, Ketua Umum MUI (non-aktif) KH Ma'ruf Amin mengatakan vaksin jika belum halal tetapi darurat karena tidak ada solusi kecuali menggunakan materi tersebut maka bisa digunakan sesuai penetapan fatwa MUI. Lukmanul Hakim mengatakan tim audit LPPOM MUI bersama delegasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biofarma dan unsur terkait sudah ke China pada pertengahan Oktober ini untuk melakukan audit vaksin Covid-19.*

*Direktur LPPOM MUI mengatakan ada tiga hal penting untuk menentukan kehalalan vaksin. Yaitu terkait sumber atau bahan dalam proses produksi, perusahaan memiliki komitmen menggunakan peralatan, fasilitas serta prosedur produksi yang terjamin kehalalannya. Ketiga, ada otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium memastikan tidak ada kontaminasi kepaluan produksi vaksin.*

### 4. MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19

Sabtu 14 Nov 2020 08:15 WIB

Rep: republika.id/ Red: republika.id

#### **‘MUI Kejar Kehalalan Vaksin Covid-19’**

*REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyatakan bakal melakukan audit yang ketat atas unsur kehalalan vaksin Covid-19. Saat ini, tim LPPOM MUI beserta tim dari lembaga lain masih berada di Cina untuk menginspeksi fasilitas produksi perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin Covid-19. Selain soal kehalalan, kunjungan tersebut untuk memastikan mutu vaksin.*

*Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan mengatakan, tim vaksin Indonesia yang berangkat ke Cina sampai saat ini masih melakukan proses survei sehingga belum ada hasil yang bisa disampaikan ke publik. Menurut dia, tim membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membawa sampel vaksin dari hasil audit lapangan.*

*"Tim vaksin berupaya melakukan proses pemeriksaan yang intensif terkait vaksin yang hendak dibeli," kata Osmena kepada Republika, Jumat (13/11).*

*Cina merupakan salah satu negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin. Indonesia telah menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Bahkan, kandidat vaksin Sinovac sedang dilakukan uji klinis tahap III di Indonesia oleh PT Bio Farma (Persero).*

*Tugas LPPOM MUI pun tidak akan selesai setelah melakukan audit lapangan di Cina. LPPOM MUI masih harus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak mengenai kemanfaatan vaksin hingga melakukan sidang fatwa halal.*

*Aspek kehalalan vaksin Covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam berbagai kesempatan memerintahkan agar vaksin Covid-19 memiliki sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meyakinkan masyarakat, khususnya umat Islam, jika suatu saat program vaksinasi Covid-19 telah berjalan.*

*Kiai Ma'ruf tak ingin polemik yang terjadi saat pelaksanaan vaksinasi Measles Rubella (MR) terjadi. Kala itu, vaksin MR telah beredar tanpa adanya sertifikat halal. Program vaksinasi MR pun akhirnya terhambat karena banyak masyarakat yang tak mau mengikuti program imunisasi.*

*Kendati pemerintah sedang berupaya memastikan unsur kehalalan vaksin, Kiai Ma'ruf juga berharap agar hal tersebut tak menjadi perdebatan. Kiai Ma'ruf mengatakan, vaksin Covid-19 bisa digunakan masyarakat dengan landasan kedaruratan, meskipun nantinya ditemukan ada kandungan nonhalal dalam vaksin.*

*Dalam pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac, bukan hanya tim Indonesia yang melakukan kunjungan lapangan. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, perwakilan Sinovac, yaitu Senior Manager Clinical Department, Yuansheng Hu, telah mengunjungi Indonesia untuk membahas progres pelaksanaan uji klinis tahap III di Indonesia. "Beliau juga memastikan vaksin ini akan memiliki keamanan dan kemampuan serta kualitas yang memenuhi standar," ujar Honesti, Kamis (12/11) malam.*

*Honesti mengatakan, uji klinis fase III yang sudah memasuki masa pemantauan akan diteruskan. Ia menjelaskan, tahap pemantauan yang dikerjakan kepada seluruh relawan bertujuan untuk melihat efikasi atau khasiat, imunogenisitas, serta memastikan keamanan dari calon vaksin Covid-19. "Diharapkan tim uji klinis akan menyelesaikan tahap monitoring ini pada Mei 2021," ujar Honesti.*

*Namun, Honesti menambahkan, pihaknya akan menyerahkan laporan interim berupa data keamanan, imunogenisitas, dan efikasi tiga bulan pada awal Januari 2021 kepada BPOM. Laporan tersebut untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat atau emergency use authorization (EUA).*

*Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia akan menghentikan pembelian vaksin dari luar negeri jika vaksin Merah Putih sudah siap diberikan ke masyarakat. Langkah tersebut, kata dia, merupakan arahan Presiden Joko Widodo.*

*"Jadi, begitu vaksin Merah Putih siap divaksinasi (ke masyarakat), sudah dapat izin BPOM, sudah diproduksi massal, saat itulah kita tidak perlu lagi membeli atau memesan dari luar (negeri)," kata Bambang, Jumat (13/11).*

*Saat ini pemerintah bersama lembaga penelitian dan perguruan tinggi mengembangkan vaksin melalui berbagai platform, antara lain, adenovirus, protein rekombinan, dan DNA. Keenam instansi itu, yakni lembaga Eijkman, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.*

*Bambang mengatakan, saat ini yang menunjukkan progres paling cepat, yaitu pengembangan vaksin di lembaga Eijkman. Kondisi terakhir vaksin tersebut berada pada tahapan ekspresi sel mamalia untuk persiapan uji hewan. Nantinya, setelah bibit vaksin siap, akan dilakukan tiga tahapan uji klinis.*

*Terkait kapasitas produksi vaksin, Bambang mengatakan Bio Farma siap memproduksi hingga 250 juta dosis selama satu tahunnya. Selain itu, perusahaan swasta lain yang berkoordinasi dengan Kemenristek/BRIN menyatakan siap memproduksi 700 juta hingga 1 miliar dosis per tahun.*

5. Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali

Jumat 23 Oct 2020 18:43 WIB

Rep: Reiny Dwinanda

**'Ahli : Vaksin Mengandung Babi Alami Penyaringan Miliaran Kali'**

*REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa jenis atau merek vaksin dalam proses pembuatannya memang bersinggungan dengan enzim yang bersumber dari babi.*

Namun, menurut pakar vaksinologi, calon vaksin kemudian mengalami pencucian dan penyaringan hingga miliaran kali.

"Pada produk akhirnya sudah tidak lagi mengandung babi," kata dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog dr Dirga Sakti Rambe SpPD melalui Youtube FMB9ID-IKP yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Dirga mengungkapkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan vaksin yang proses pengembangannya memakai enzim babi. Terlebih, semua vaksin yang pada proses pembuatannya bersinggungan dengan enzim babi itu tertulis jelas pada kemasannya.

Lebih lanjut, Dirga mengatakan, untuk membuat vaksin baru dibutuhkan proses dan tahapan yang begitu panjang. Proses itu ditujukan memastikan vaksin tersebut betul-betul aman dan efektif. "Setelah kita menetapkan ingin membuat suatu jenis vaksin baru maka akan diuji coba dulu pada binatang percobaan, jika terbukti aman dan efektif maka akan diuji coba pada manusia," jelas dia.

Uji coba itu disebut tahapan uji klinis yang terdiri dari tiga tahap dan keseluruhannya melibatkan 1.000 relawan manusia dengan tujuan memastikan vaksin aman dan efektif. Dalam pembuatan vaksin dibutuhkan waktu yang lama karena harus memenuhi tahapan-tahapan tersebut.

Hanya saja, pada situasi tertentu, proses pembuatan vaksin bisa diupayakan menjadi lebih cepat, tanpa mengabaikan aspek efektivitas dan keamanan. Pengecualian juga berlaku dalam merespons pandemi Covid-19 saat ini yang membutuhkan keberadaan vaksin dengan segera untuk melindungi masyarakat.

Dirga menjelaskan, cara kerja vaksin. Ia mengungkapkan, vaksin dapat diberikan dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke tubuh. Vaksin akan merangsang sel-sel imunitas untuk membentuk antibodi. "Antibodi ini ibarat seperti pasukan yang siap akan melawan penyakit kelak bila terpapar virus, bakteri, atau jamur," ujar Dirga.

Saat ini, ada beberapa kandidat vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan pemerintah, seperti vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Kandidat vaksin hasil kolaborasi dengan pihak luar negeri antara lain, Bio Farma dengan Sinovac dari China, Kimia Farma dengan G42 dari Uni Emirat Arab, dan Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan.

6. MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal

Rabu 16 Dec 2020 10:09 WIB

RED: Ichsan Emerald Alamsyah

#### **'MPR: Peredaran Vaksin Tunggu Izin BPOM dan Sertifikasi Halal'**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si menegaskan bahwa 1,2 Juta Vaksin Covid-19 siap pakai dari perusahaan asal China Sinovac yang sudah berada di Indonesia, boleh diedarkan asal sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

*EUA, disepakati berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hasil konsultasi dengan beberapa regulator obat dunia seperti FDA (Amerika Serikat) dan EMA (Eropa), bisa dikeluarkan saat pandemi jika vaksin bisa memenuhi persyaratan terkait kelengkapan data seperti laporan menyeluruh uji klinik vaksin fase 1 dan 2, analisis interim fase 3, dan data efficacy (efektivitas) vaksin minimum 50 persen.*

*Sedangkan sertifikasi halal dikeluarkan jika vaksin tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan MUI. Izin-izin tersebut sangat penting, sebab akan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meminimalisir keengganan dan ketakutan rakyat untuk divaksinasi.*

*“Ini mesti benar-benar diperhatikan secara serius sebab pemerintah memang bertanggung jawab memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat,” katanya.*

*Hal tersebut disampaikan saat hadir Secara virtual pada acara diskusi empat pilar dengan tema ‘Menanti Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19’ kerjasama MPR dengan koordinatariat wartawan parlemen, di media center MPR/DPR, Lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Hadir juga secara daring ketua mui pusat Dr. Kh. Asrorun Niam Sholeh, MA serta para wartawan media massa elektronik, cetak, online nasional.*

*Namun, anggota MPR yang juga anggota Komisi IX DPR ini mengungkapkan bahwa saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Yang Digelar Komisi IX Pada Tanggal 10 Desember 2020 lalu, dihadiri Menteri Kesehatan, ketua satgas penanganan Covid-19, satgas pemulihan ekonomi nasional, kepala BPOM + Dirut Bio Farma muncul fakta bahwa semua perizinan baik itu EUA dan sertifikasi halal belum bisa dikeluarkan, sebab semuanya masih dalam proses. Artinya, vaksin ini belum bisa atau belum boleh diedarkan di Indonesia.*

*“Sebagai wakil rakyat, kita prinsipnya menginginkan dan meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan dulu semua proses tahap perizinan dan semua sertifikat-sertifikat yang harus dikeluarkan, utamakan keselamatan rakyat kami akan dukung sepenuhnya,” tambahnya.*

*Kurniasih juga menekankan, dalam proses pemenuhan semua perizinan tersebut agar transparan dan independen. “Saya mengajak BPOM dan MUI untuk memahami keadaan darurat seperti ini, rakyat sangat membutuhkan vaksin agar kehidupan mereka berjalan normal kembali,” tandasnya.*

*Di kesempatan yang sama, ketua MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan bahwa isu keamanan dan kehalalan adalah dua aspek yang memang menjadi komitmen pemerintah dalam upaya awal pencarian dan pengadaan vaksin Covid-19.*

*Komitmen itu dimulai dari tanggal 27 Agustus dengan munculnya inisiasi dari pemerintah melalui Wakil Presiden RI, saat menerima Bio Farma. Waktu itu, wapres menjelaskan secara khusus mengenai pentingnya aspek kepatuhan syariah di samping aspek keamanan dari pengadaan vaksin. hal itu, kemudian ditindaklanjuti dengan*

*pembentukan tim teknis untuk percepatan sertifikasi halal vaksin terdiri dari Kementerian BUMN, Kemenkes, BPOM, MUI dan Bio Farma.*

*Dalam perjalanannya, ternyata Sinovac secara formal mengajukan permohonan sertifikasi halal. Tim pun bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan semua dokumen. Setelah semua proses kelengkapan dokumen terpenuhi, maka pada tanggal 15 Oktober 2020, Tim LPPOM MUI, Tim Komisi Fatwa MUI, Tim Kementerian Kesehatan dan BPOM kemudian berangkat ke Tiongkok untuk kepentingan proses auditing lapangan untuk dua tujuan tadi yakni audit aspek keamanan dan juga tujuan aspek kehalalan.*

*“Setelah melalui karantina mandiri selama dua minggu, tanggal 2-5 November audit kemudian dilaksanakan di Beijing. Tanggal 12 November kembali ke Jakarta dan melakukan rapat internal untuk mengkaji temuan audit. pada rapat tanggal 14 desember dikeluarkan hasil audit yakni, masih ada dokumen penting yang harus disediakan Sinovac. Posisi terakhir, tim auditor masih menunggu dokumen tersebut untuk dilakukan kajian kembali. Pada intinya, MUI sampai detik ini tetap komit memberikan prioritasnya membahas aspek kehalalan vaksin Covid-19,” terangnya.*

## **Lampiran Berita CNNIndonesia.com**

### **1. Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI**

CNN Indonesia | Jumat, 16/10/2020 19:36 WIB

#### **‘Ma'ruf Sebut Vaksin Covid Tak Halal Harus Ada Ketetapan MUI’**

*Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penggunaan vaksin virus corona (Covid-19) tetap harus berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekalipun dinyatakan tidak halal.*

*Menurut Ma'ruf, ketetapan MUI itu penting agar vaksin Covid-19 yang tidak halal tetap dapat digunakan dalam keadaan darurat, selama vaksin yang halal belum ditemukan.*

*"Maka bisa digunakan walau tidak halal secara darurat, tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa iya, ini boleh digunakan karena keadaannya darurat, tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI," ujar Ma'ruf dalam bincang bersama Tim Satgas Covid-19, Reisa Broto Asmoro yang disiarkan akun YouTube, Jumat (16/10).*

*Ma'ruf kembali menerangkan bahwa vaksin corona, meskipun tidak halal, boleh digunakan bila dalam kondisi darurat. Kasus demikian sempat terjadi kala vaksin untuk meningitis juga belum ditemukan.*

*Berkaca dari vaksin meningitis itu, Ma'ruf menyebut vaksin yang dinyatakan tidak halal tetap boleh digunakan untuk mencegah dampak lain yang lebih berbahaya. "Seperti meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin akan timbul bahaya, akan timbulkan penyakit atau penyakit berkepanjangan," kata dia.*

*Ketua MUI itu turut menjelaskan, dalam ajaran Islam menjaga jiwa termasuk satu dari lima tujuan syariat, selain menjaga agama.*

*Dalam kondisi normal, dia berkata menjaga agama harus dinomorsatukan. Namun, dalam kondisi darurat seperti pandemi, menjaga jiwa menurut dia harus diutamakan. "Karena apa? menjaga jiwa enggak ada alternatif, maka harus diutamakan. Dalam agama, kerjakan salat, ada kemudahan-kemudahan," ujar dia.*

*Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah serius mengembangkan vaksin lewat Keputusan Presiden Nomor 18/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.*

*Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 5 Oktober lalu itu, pemerintah telah mengatur pengadaan hingga distribusi vaksin Covid-19.*

*Proses pengadaan vaksin itu bakal dilakukan oleh BUMN PT Bio Farma (Persero). Sementara jenis dan jumlah pengadaan vaksin Covid-19 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.*

*Jokowi sebelumnya juga menargetkan bahwa program vaksinasi Covid-19 bakal dilakukan pada akhir 2020. Cara itu dilakukan pemerintah baik mandiri maupun bekerja sama dengan negara lain seperti China dan Uni emirat Arab.*

## 2. Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19

Satgas Covid-19, CNN Indonesia | Minggu, 18/10/2020 19:04 WIB

### **‘Wapres Sebut MUI Terlibat dalam Penanganan Covid-19’**

*Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19. Umat Islam tak perlu khawatir soal kesesuaian syariat Islam dalam berbagai protokol penanganan Covid-19.*

*Ia menyebut, selama ini fatwa MUI banyak menjadi acuan, seperti dalam ibadah salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, dan pembayaran zakat yang dapat dipergunakan penanggulangan pandemi, termasuk tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan baju hazmat.*

*"Karena mereka tidak mudah membuka bajunya, bagaimana sulitnya melakukan salat seperti biasa, melakukan ruku, sujud dengan sempurna. Itu (dari MUI) ada panduannya," kata Ma'ruf dalam dialog dengan Juru Bicara #SatgasCovid-19 Reisa Broto Asmoro, Jumat (16/10) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.*

*Acuan itu, menurut Ma'ruf, merupakan bukti fatwa MUI menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat.*

*"Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi," ujarnya.*

*Ma'ruf menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah MUI. "Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia," katanya.*

*Lebih lanjut, Ma'ruf berpesan agar masyarakat tetap istiqomah dan tidak boleh menyerah dalam menegakkan protokol kesehatan. Kepada para petugas, ia meminta agar sosialisasi dilakukan secara masif, berikut edukasi tentang upaya pemerintah. Ia*



*berharap pendekatan dilakukan dengan baik, terutama di daerah-daerah sumber penularan.*

*Sosialisasi tersebut antara lain mengenai pelaksanaan protokol kesehatan yang terdiri atas #ingatpesanibu untuk #pakaimasker, #cucitangan pakai sabun, serta #jagajarak dan hindari kerumunan.*

### 3. 'MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19'

CNN Indonesia | Senin, 19/10/2020 16:48 WIB

#### **'MUI Belum Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19'**

*Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum dapat memastikan kehalalan vaksin virus corona (Covid-19). Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal vaksin.*

*Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Fatwa Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati menjelaskan, saat ini tim LPPOM MUI masih melakukan pemeriksaan terkait produksi vaksin covid-19 di China bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BUMN.*

*Nantinya, setelah pihaknya mendapatkan hasil penelitian, maka akan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan keputusan halal atau tidaknya vaksin.*

*"Kita masih menunggu audit dari tim yang pergi ke China. Jadi saat ini belum bisa jawab apakah halal atau tidak karena prosesnya belum berjalan, kita masih nunggu hasil pemeriksian," jelas Muti dalam konferensi pers daring 'Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia', Senin (19/10).*

*Ia merinci, tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI cukup panjang. Pertama, MUI harus mengetahui kehalalan bahan baku dari produk yang digunakan. Kemudian melakukan penelusuran kehalalan fasilitas yang digunakan, dan menjamin komitmen perusahaan menyiapkan produk yang halal.*

*Kemudian, LPPOM MUI melakukan uji otentifikasi di laboratorium. Uji otentifikasi ini bertujuan untuk menjamin tidak ada pemalsuan vaksin, sehingga keamanan vaksin juga terjamin.*

*"Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai, ini akan diputuskan oleh komisi fatwa. Kalau produksinya tidak halal, bagaimana penggunaannya itu akan ditentukan oleh Komisi Fatwa MUI," ucapnya.*

*Sementara itu, tiga kandidat vaksin covid-19 yakni Sinovac, Sinopharm (G24), dan CanSino rencananya Sebanyak 18,1 juta dosis akan diberikan kepada 9,1 juta orang pada akhir November mendatang.*

*MUI menyatakan ada tiga syarat sertifikasi halal vaksin Covid-19. Poin tersebut menjadi prinsip dalam proses sertifikasi halal. Pertama traceability atau ketertelusuran. Proses ini dinilai penting untuk mengetahui produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang halal atau tidak.*

*Kedua, harus ada jaminan kehalalan atau sistem jaminan halal, misalnya menggunakan bahan yang halal dalam proses produksinya dan menggunakan fasilitas halal atau tidak.*

*Terakhir otentikasi melalui uji lab. proses uji lab ini untuk memastikan tidak ada kontaminan sehingga bahan produk yang disertifikasi halal itu betul-betul bisa dipastikan kehalalannya.*

#### 4. MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal

CNN Indonesia | Senin, 07/12/2020 11:47 WIB

##### **'MUI buka opsi tetap izinkan vaksin covid seandainya tak halal'**

*Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF mengatakan pihaknya membuka peluang memperbolehkan penggunaan vaksin virus corona (Covid-19) buatan Sinovac seandainya vaksin tersebut mengandung zat yang tidak halal.*

*MUI sampai saat ini masih merumuskan fatwa untuk vaksin covid Sinovac yang telah tiba di Indonesia. Menurutnya, vaksin yang tidak halal tetap bisa digunakan karena saat ini Indonesia dalam kondisi darurat dan belum ditemukan vaksin yang mengandung bahan-bahan halal.*

*"Nah, nanti misalnya kalau diputuskan haram, sebabnya itu dalam keadaan darurat bisa digunakan sementara sebelum ada vaksin covid yang halal," kata Hasanuddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/12).*

*Meski demikian, Hasanuddin menegaskan keputusan tersebut harus melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan penjelasan, seperti para ahli vaksin hingga pemerintah. Pelibatan pihak-pihak tersebut untuk benar-benar memastikan belum vaksin corona lain yang memiliki kandungan halal.*

*Apabila belum ada vaksin halal, Ia mengatakan Komisi Fatwa MUI akan bersidang kembali untuk memutuskan vaksin tersebut boleh digunakan dengan pertimbangan kondisi darurat. Sebaliknya, jika sudah ditemukan vaksin yang halal maka harus diutamakan penggunaan vaksin halal tersebut. "Misalnya ada pendapat dari para ahli sampai saat ini belum ada vaksin yang halal. Bila ada vaksin yang halal selain dari China harusnya diutamakan dulu yang halal," kata dia.*

*Saat ini Komisi Fatwa MUI masih menunggu laporan dari berbagai pihak, termasuk dari LPPOM MUI terkait kajian vaksin Sinovac. "Kalau komisi fatwa tergantung dari LPPOM MUI dari hasil kajian audit ke China itu. Itu mestinya dilaporkan ke rapat komisi fatwa bila sudah selesai. Setahu saya sampai saat ini saya belum ada itu sampai sekarang," kata Hasanuddin.*

*Sebelumnya, MUI pernah menerbitkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) dari Serum Institute of India untuk Imunisasi. Fatwa itu mengatakan bahwa vaksin MR mengandung unsur haram tapi boleh digunakan karena darurat dan belum ditemukan vaksin yang halal.*

*Hingga saat ini, belum diketahui data keamanan dan efikasi atau kemanjuran dari uji klinis tahap ketiga Vaksin Sinovac. Hal ini berbeda dari Pfizer yang telah mengeluarkan data efikasi yaitu 90 persen efektif, dan Moderna dengan klaim tingkat efektifitas hingga 94,5 persen.*

*Di Indonesia, uji klinis Vaksin Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran baru tuntas pada Mei 2021 dan laporan awal pada Januari 2021. Pemerintah menyatakan vaksin itu belum bisa langsung digunakan karena harus menjalani rangkaian tahapan lagi untuk menjamin kesehatan dan keamanan masyarakat.*

## 5. Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring

CNN Indonesia | Selasa, 27/10/2020 06:20 WIB

### **'Ahli : Kandungan Babi di Vaksin Bisa Hilang Usai Disaring'**

*Jakarta, CNN Indonesia -- Isu vaksin haram karena mengandung babi masih menjadi momok di Indonesia menjelang kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo meyakinkan tidak ada kandungan babi yang terdeteksi dari hasil akhir vaksin.*

*Di sisi lain, Ahmad mengatakan dalam proses pembuatan antigen dibutuhkan sel babi untuk menghasilkan panen komponen vaksin yang baik. Namun tetap tidak ada kandungan babi yang masuk dalam vaksin karena melewati proses penyaringan atau pemurnian antigen.*

*Ahmad menjelaskan dalam memproduksi antigen tersebut dibutuhkan sel mamalia sebagai inang. Selama dalam pertumbuhan, jumlah sel inang tersebut semakin banyak yang diikuti dengan jumlah partikel virus yang juga makin banyak.*

*Supaya tidak overcrowded sel inang perlu dipisahkan dengan enzim tripsin di mana sumber tripsin yang handal berasal dari babi.*

*"Namun yang di gunakan sebagai vaksin itu antigen kuman bukan tripsin. Ketika virus mulai banyak yang keluar dari sel inang, maka medium cair akan dituang dan diproses untuk pemurnian antigen," kata Ahmad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/10).*

*Ahmad menuturkan sel inang antigen sudah terpisah dengan tripsin itu, ia mengingatkan penggunaan tripsin sangat sedikit. Oleh karena itu, Ahmad menuturkan tidak ada yang namanya 'vaksin babi', antigen vaksin adalah protein dari kuman seperti virus atau bakteri.*

*"Dalam proses pemurnian bertingkat, kandungan final dari vaksin sudah tidak terdeteksi lagi tripsin babi. Kalau tidak terdeteksi lalu haramnya di mana," kata Ahmad.*

*Di sisi lain, Dokter spesialis anak dari Yayasan Orangtua Peduli Windhi Kresnawati mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada bagian babi yang masuk dalam vaksin.*

*Enzim akan dimurnikan kembali sehingga komponen perantara tidak ikut masuk pada vaksin. Ketika dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan enzim dari babi, pada produksi akhirnya hanya virus yang masuk dalam vaksin.*

*"Seandainya tetap tidak mau. Karena bersinggungan, kita merujuk negara lain yang maju yang mayoritas Muslim dan MUI yang sudah sampaikan halal. Untuk kebaikan dan dalam keadaan mencegah penyakit yang lebih berat dan berbahaya, vaksin halal," katanya.*

*Dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe juga menjelaskan calon vaksin mengalami pencucian dan penyaringan hingga miliaran kali.*

*"Pada produk akhirnya sudah tidak lagi mengandung babi. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir semua vaksin yang pada proses pembuatannya bersinggungan dengan enzim babi itu tertulis jelas pada kemasannya," ujar Dirga.*

## 6. PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat

CNN Indonesia | Rabu, 30/12/2020 07:56 WIB

### **'PBNU Bolehkan Vaksin Corona Tak Halal Asal Kondisi Darurat'**

*Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan bahwa vaksin virus corona (Covid-19) boleh digunakan bila nantinya ditemukan unsur tak halal karena dalam kondisi darurat.*

*"Tapi yang dharar itu apa saja boleh. Karena darurat. Apa aja boleh. Misalkan, misalkan nanti mentoknya [vaksin] ada unsur yang tak halal, boleh, boleh," kata Said saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (29/12).*

*Ia mencontohkan bahwa hasil Munas Alim Ulama NU di Pesantren Qomarul Huda, NTB tahun 1997 lalu pernah menghasilkan keputusan memperbolehkan penggunaan insulin bagi penderita kencing manis karena darurat.*

*Padahal, Insulin itu terbuat dari gen pankreas babi. Seperti diketahui, Babi sendiri merupakan hewan yang diharamkan dalam ajaran Islam untuk dikonsumsi.*

*"Seperti insulin itu kan yang paling bagus terdiri dari pankreasnya babi. Diputuskan oleh PBNU di Munas boleh," kata Said.*

*Meski demikian, Said mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terus menggodok penyusunan fatwa halal vaksin virus Corona. Ia berharap MUI bisa semaksimal mungkin melihat apakah vaksin Corona yang tersedia saat ini sudah memiliki kandungan yang halal atau belum.*

*"Silakan semaksimal mungkin. Sampai semaksimal mungkin untuk di lihat seberapa halal atau tidak," kata dia.*

*Diketahui, MUI sampai saat ini belum mengumumkan terkait kehalalan vaksin Corona yang sudah tiba di Indonesia. MUI mengaku tak mau buru buru mengeluarkan fatwa halal vaksin Covid 19. Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar mengatakan pihaknya pun akan segera membahasnya melalui forum Bahtsul Masail.*

*Ketua MUI Asrorun Niam membeberkan kendala bahwa Sinovac, produsen vaksin Covid-19, masih belum melengkapi dokumen untuk proses sertifikasi halal. Ia*

*menjelaskan dokumen yang belum dipenuhi itu terkait dengan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin.*

